

LAPORAN PENGABDIAN

**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI KAMPUNG
KELUARGA BERENCANA SEBAGAI UPAYA PENANGGULANGAN
KEMISKINAN DI DESA TENGGERRAHARJA
KECAMATAN SUKAMANTRI
KABUPATEN CIAMIS**



Oleh:

NINA HERLINA, Ir., MM.

NIDN : 0415056706

MARLINA NUR LESTARI, SE.,MM

NIDN : 0426038204

**DIBIYAI OLEH LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS GALUH TAHUN ANGGARAN 2018**

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS GALUH

MEI 2019

CURRICULUM VITAE

N A M A : HJ. NINA HERLINA, IR., M.M.
NIK : 08.3112770133
NIDN : 0415056706
TEMPAT/TGL LAHIR : CIAMIS, 15 MEI 1967
AGAMA : ISLAM
ALAMAT : JL. OTO ISKANDARDINATA NO. 332 RT 02/RW 10
BOJONGMENGGER CIAMIS 46271
PANGKAT/ GOL : PENATA MUDA TK I / III B
JABATAN FUNGSIONAL : ASSISTEN AHLI
PENDIDIKAN :
1. SD NEGERI 3 BOJONGMENGGER – CIAMIS
2. SMP NEGERI 1 CIAMIS – CIAMIS
3. SMA NEGERI 1 – CIAMIS
4. S 1 – INSTITUT PERTANIAN BOGOR – BOGOR
5. S 2 – UNIVERSITAS GALUH – CIAMIS
JABATAN : DOSEN UNIVERSITAS GALUH – CIAMIS

LEMBAR IDENTITAS DAN PENGESAHAN

LAPORAN PENGABDIAN DENGAN PENDANAAN LPPM UNIGAL

1. Judul Pengabdian : “Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kampung Keluarga Berencana Sebagai Upaya Penanggulangan Kemiskinan di Desa Tenggerraharja Kecamatan Sukamantri Kabupaten Ciamis”.
 2. Ketua Pelaksana
 - a. Nama Lengkap dan Gelar : Hj. Nina Herlina. Ir., MM
 - b. Jenis Kelamin : Perempuan
 - c. Pangkat/Gol/Ruang/NIK : Penata Muda/ III/ b/08.311 277 0133
 - d. Jabatan Fungsional : Asisten Ahli
 - e. Sedang melakukan penelitian : Tidak
 - f. Fakultas/Program Studi : F. Ekonomi / Manajemen
 - g. Bidang Keahlian : Manajemen
 3. Personalia
 - a. Jumlah anggota pengabdian : 1 Orang
 4. Jangka Waktu Kegiatan : 5 bulan
 5. Bentuk Kegiatan : Penyuluhan, Diskusi, pengambilan data dan evaluasi sesuai aturan yang berlaku
 7. Biaya yang dibelanjakan : Rp. 4.000.000,-
-

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi

Ciamis, 09 Mei 2019
Ketua Pelaksana,

Nurdiana Mulyatini, SE., M.M.
NIK : 03 311 277 0079

Hj. NINA HERLINA, Ir., M.M.
NIK : 08 3112770133

**Menyetujui,
Ketua LPPM Unigal**

Ir. Sudrajat., M.P.
NIK : 311 277 0087

KATA PENGANTAR

Dengan memohon ridha dari Allah SWT semoga taufik dan hidayah-Nya selalu dilimpahkan kepada segenap insan yang selalu bertaqwa kepadaNya dan mendapatkan keberkahan, Aamiin Ya Rabbal alamiin.

Rencana kegiatan Pengabdian ini berjudul: Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kampung KB Sebagai Upaya Penanggulangan Kemiskinan di Desa Tenggerraharja Kecamatan Sukamantri Kabupaten Ciamis Propinsi Jawa Barat, yang akan dilaksanakan bulan Desember 2018 sampai April 2019.

Kampung KB dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 14 Januari 2016. Sejak saat itu masyarakat semangat mendirikan kampung KB dan langsung tumbuh dengan pesat di seluruh Indonesia. Dalam jangka waktu satu tahun yaitu tahun 2017 bisa mencapai target setiap satu Kecamatan memiliki satu Kampung KB di seluruh Indonesia. Artinya sepanjang tahun 2017 sudah memiliki sekitar 7166 kampung KB di seluruh Indonesia.

Kampung KB merupakan salah satu program Unggulan pemerintah dalam rangka mengatasi masalah kependudukan, terutama di daerah-daerah yang jarang dikunjungi baik oleh pemerintah maupun pendatang. Kampung KB diharapkan menjadi IKON program kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga sehingga bertujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat di perkampungan dan mewujudkan keluarga kecil berkualitas.

Pada prinsipnya program ini mewujudkan keluarga kecil bahagia dan sejahtera dengan melaksanakan dekapan fungsi keluarga. Penerapan fungsi keluarga ini akan membantu keluarga lebih bahagia dan sejahtera, sehingga akan terbebas dari kemiskinan, kebodohan dan keterbelakangan.

Dengan demikian melalui kegiatan pengabdian ini penulis ingin berperan dalam menganalisis Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kampung KB Sebagai Upaya Penanggulangan Kemiskinan di Desa Tenggerraharja Kecamatan Sukamantri Kabupaten Ciamis Propinsi Jawa Barat.

Selanjutnya melalui kegiatan ini penulis ingin mengucapkan banyak terimakasih yth.Kepada:

1. Rektor Universitas Galuh beserta jajarannya yang telah memotivasi dosen untuk melaksanakan penelitian dan pengabdian bagi dosen;
2. LPPM Universitas Galuh beserta jajarannya yang telah memfasilitasi dan menyebarkan kepada dosen untuk kegiatan pengabdian;
3. Kepala Desa Tenggerraharja Kecamatan Sukamantri Kabupaten Ciamis yang bersedia memfasilitasi kegiatan Pengabdian di wilayahnya.
4. Semua pihak yang membantu dan berpartisipasi dalam kegiatan pengabdian di Universitas Galuh.

Semoga kegiatan pengabdian ini menjadi bahan atau kajian yang dapat dikembangkan untuk kemajuan kegiatan pembangunan, dan dapat di implementasikan di kampus khususnya untuk kemajuan dan pelayanan optimal kepada mahasiswa Universitas Galuh dalam hal peningkatan sumber daya dosen dan mahasiswa.

Akhirnya semoga amal baik kita mendapat pahala dan berkah-Nya dari Allah SWT...Amin.

Ciamis, 10 Mei 2019

Penulis

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Analisis Situasi

Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) merupakan program yang sangat penting bagi pemerintah, terutama pengendalian jumlah penduduk yang sangat berhubungan dengan tingkat kesejahteraan masyarakat.

Ditinjau dari sisi kesejahteraan masyarakat, pertumbuhan ekonomi yang dicapai tidak akan memberikan dampak positif yang berarti jika pertumbuhan penduduk juga tidak terkendali, mungkin seperti jalan ditempat bahkan mungkin mengalami kemunduran. Sedangkan ditinjau dari sisi permasalahan sosial, kesehatan dan pendidikan, maka jumlah penduduk yang besar akan menimbulkan permasalahan mulai dari pengangguran, pemukiman, ketersediaan lapangan kerja, keamanan, gizi buruk serta berbagai masalah lain yang bersumber pada jumlah penduduk yang besar.

Kampung KB merupakan istilah baru sejak program ini diluncurkan oleh Presiden RI Joko Widodo pada bulan Januari 2016. Istilah “Kampung” mungkin yang ada di benak masyarakat adalah suatu tempat hunian yang kumuh, terdiri dari orang-orang atau keluarga yang penuh dengan keterbelakangan dan keterbatasan di berbagai sektor, baik pendidikan, kesehatan, penerangan, informasi dan hal-hal lain.

Namun sejak program ini dicanangkan oleh Presiden RI maka istilah Kampung KB menjadi sangat populer dan menjadi Icon program Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga. Hampir semua lembaga pemerintah mulai dari tingkat daerah sampai ke tingkat pusat

memperbincangkan program untuk suksesnya kegiatan di Kampung KB. Demikian pula di kalangan masyarakat bawah, menengah sampai masyarakat kalangan elit serta pemberitaan di media massa, media elektronik dan media sosial menjadi topik yang hangat dan populer menampilkan pemberitaan tentang Kampung KB.

Adapun latar belakang Kampung KB dibentuk adalah sebagai berikut :

1. Program KB mulai berkurang gaungnya, mungkin masyarakat sudah menyadari manfaatnya.
2. Melalui program Kampung KB pembangunan di semua sektor dapat lebih meningkat untuk mewujudkan tingkat kualitas hidup masyarakat yang lebih baik di tingkat kampung.
3. Penguatan program Kampung KB yang dikelola dan diselenggarakan oleh, dari dan untuk masyarakat.
4. Merupakan tindak lanjut dari Nawacita agenda prioritas ke 3, yaitu “Memulai pembangunan dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan” serta agenda Prioritas ke 5 yaitu “Meningkatkan Kualitas Hidup masyarakat Indonesia”
5. Menggairahkan kembali Program KB untuk menyongsong tercapainya bonus Demografis yang dipredikisi akan terjadi pada tahun 2010 – 2030.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan analisis situasi di atas, maka permasalahan yang di kaji dalam pengabdian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kampung KB Sebagai Upaya Penanggulangan Kemiskinan di Desa Tenggerraharja Kecamatan Sukamantri Kabupaten Ciamis
2. Bagaimana peranan Kelompok Kegiatan dan Kelompok Kerja Kampung KB dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan di Desa Tenggerraharja Kecamatan Sukamantri Kabupaten Ciamis

1.3 Tujuan Pengabdian

Adapun yang menjadi tujuan dari pengabdian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kampung KB Sebagai Upaya Penanggulangan Kemiskinan di Desa Tenggerraharja Kecamatan Sukamantri Kabupaten Ciamis
2. Untuk mengetahui peranan Kelompok Kegiatan dan Kelompok Kerja Kampung KB dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan di Desa Tenggerraharja Kecamatan Sukamantri Kabupaten Ciamis

1.4 Manfaat Pengabdian

Manfaat yang di harapkan dalam pengabdian ini adalah:

1. Manfaat untuk Sasaran

Sebagai bahan untuk meningkatkan aktivitas dalam berbagai kelompok kegiatan dan kelompok kerja sehingga setiap lapisan masyarakat terlibat dalam pemberdayaan aktivitas di Kampung KB Desa Tenggerraharja

Kecamatan Sukamantri Kabupaten Ciamis. Disamping itu setiap lapisan masyarakat terlibat dalam upaya percepatan pengentasan kemiskinan.

2. Manfaat untuk Tim Pengabdian

Bagi Tim Pengabdian hal ini diharapkan dapat memberikan pengalaman berinteraksi langsung dengan masyarakat terutama stake holder di Kampung KB sehingga mampu merumuskan solusi yang lebih baik untuk membantu perekonomian masyarakat, khususnya melalui berbagai program dan kegiatan sebagai Upaya Penanggulangan Kemiskinan Desa Tenggerraharja Kecamatan Sukamantri Kabupaten Ciamis dalam rangka percepatan pengentasan kemiskinan

3. Manfaat bagi Institusi

Melalui kegiatan ini diharapkan dapat terjalin kerja sama yang lebih baik antara Universitas Galuh Ciamis dengan perangkat pemerintahan beserta masyarakat di Desa Tenggerraharja Kecamatan Sukamantri masa mendatang khususnya dalam pemberdayaan masyarakat di Kampung KB, sehingga dapat memberikan kontribusi positif pada kedua belah pihak.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teoritis

2.1.1 Konsep Pemberdayaan

Istilah Pemberdayaan atau Empowerment menjadi sebuah istilah yang sangat populer di masyarakat Indonesia terutama pada saat terjadinya krisis moneter yang berimbas kepada krisis yang bersifat multidimensi. Kata “Pemberdayaan” sering dirangkaikan dengan kata lain seperti kata organisasi, birokrasi, dan kata-kata lain tidak ketinggalan pula kata masyarakat.

Banyak orang memaknai istilah Pemberdayaan dari satu sudut pandang sesuai dengan kepentingannya. Namun istilah Pemberdayaan sebenarnya memiliki aspek yang sangat luas sehingga menjelaskan istilah Pemberdayaan harus digunakan berbagai konsep dan teori dari berbagai pakar yang memang ahli dibidangnya.

Pemberdayaan menurut arti secara bahasa adalah proses, cara, perbuatan membuat berdaya, yaitu kemampuan untuk melakukan sesuatu atau kemampuan bertindak yang berupa akal, ikhtiar atau upaya (Depdiknas, 2003). Pemberdayaan menurut Suhendra (2006:74-75) adalah “suatu kegiatan yang berkesinambungan, dinamis, secara sinergis mendorong keterlibatan semua potensi yang ada secara evolutif dengan keterlibatan semua potensi”.

Pemberdayaan menurut Rendra Drago (2018) merupakan suatu proses yang pada hakekatnya bertujuan untuk terwujudnya “perubahan “. Oleh karena itu mulai dari titik mana kita melihat bahwa individu tergerak ingin melakukan suatu sikap dan perilaku termotivasi dan memiliki keterampilan yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan dalam rambu-rambu nilai/norma yang memberikannya rasa keadilan dan kedamaian dalam mencapai tujuan bersama untuk kesejahteraan. Sedangkan pemberdayaan menurut Ife (dalam Suhendra, 2006:77) adalah “meningkatkan kekuasaan atas mereka yang kurang beruntung (empowerment aims to increase the power of disadvantage)”.

Selanjutnya menurut Wikipedia, 2018 pemberdayaan masyarakat adalah proses pembangunan dimana masyarakat berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial dan untuk memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri. Pemberdayaan masyarakat hanya bisa terjadi apabila masyarakat itu sendiri ikut berpartisipasi. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan dengan efektif apabila sudah memberdayakan masyarakatnya. Pemberdayaan adalah kemampuan untuk melakukan sesuatu atau kemampuan bertindak yang berupa akal, ikhtiar atau upaya.

Suatu usaha atau kegiatan dikatakan berhasil dan dinilai sebagai “pemberdayaan masyarakat” apabila kelompok komunitas atau masyarakat tersebut menjadi agen pembangunan atau dikenal juga sebagai Subjek. Subjek merupakan motor penggerak dan bukan sebagai penerima manfaat atau Objek (Wikipedia,2018)

Suatu hal dapat dikatakan berdaya apabila hal tersebut sesuai dengan yang dikehendaki. Artinya, pencapaian yang dimaksud merupakan pencapaian tujuan dari pemberdayaan masyarakat melalui Kampung KB sebagai upaya penanggulangan kemiskinan di Desa Tenggerraharja Kecamatan Sukamantri Kabupaten Ciamis. dapat dilakukan tindakan atau kegiatan supaya mencapai tujuan tersebut.

2.1.2 Penilaian Pemberdayaan

Pengukuran tingkat pemberdayaan dapat dinilai dengan membandingkan antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan dari berbagai kegiatan. Jika usaha atau hasil pekerjaan dan tindakan yang dilakukan tidak tepat sehingga menyebabkan tujuan tidak tercapai atau sasaran yang diharapkan, maka hal itu dikatakan tidak efektif.

Adapun kriteria atau ukuran mengenai pencapaian tujuan efektif atau tidak, sebagaimana dikemukakan oleh Suhendra (2006:74-75), yaitu:

1. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai, hal ini dimaksudkan supaya karyawan dalam pelaksanaan tugas mencapai sasaran yang terarah dan tujuan organisasi dapat tercapai.
2. Kejelasan strategi pencapaian tujuan, telah diketahui bahwa strategi adalah suatu cara yang diikuti dalam melakukan berbagai upaya dalam mencapai sasaran-sasaran yang ditentukan agar para implementer tidak tersesat dalam pencapaian tujuan organisasi.
3. Proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap, berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai dan strategi yang telah ditetapkan artinya kebijakan harus mampu menjembatani tujuan-tujuan dengan usaha-usaha pelaksanaan kegiatan operasional.

4. Perencanaan yang matang, pada hakekatnya berarti memutuskan kegiatan apa yang dikerjakan oleh kelompok kegiatan dan kelompok kerja dimasa yang akan datang.
5. Penyusunan program yang tepat, suatu rencana yang baik perlu dijabarkan dalam petunjuk pelaksanaan yang tepat sebab apabila tidak, para pelaksana kurang memiliki pedoman dalam beraktivitas dan bekerja.
6. Tersedianya sarana dan prasarana kerja, merupakan salah satu indikator yang diperlukan. Pemberdayaan adalah kemampuan bekerja secara produktif. Dengan sarana dan prasarana yang tersedia maka kegiatan kelompok kerja dan kelompok masyarakat lebih baik.
7. Semua kegiatan di Kampung KB harus melibatkan pemberdayaan masyarakat, bagaimanapun baiknya suatu program apabila tidak dilaksanakan dengan memberdayakan masyarakat maka kelompok kerja tidak akan mencapai sasarannya.

2.1.3 Indikator Pemberdayaan

Schuler, Hashemi dan Riley dalam (Edi Suharto;2008) mengembangkan beberapa indikator pemberdayaan, yang mereka sebut sebagai empowerment index atau indeks pemberdayaan. Indikator pemberdayaan tersebut adalah :

- ✓ Kebebasan mobilitas, yaitu kemampuan individu untuk pergi ke luar rumah atau wilayah tempat tinggalnya, seperti ke pasar, fasilitas kesehatan, bioskop, rumah ibadah, ke rumah tetangga. Tingkat mobilitas ini dianggap tinggi jika individu mampu pergi sendirian.

- ✓ Kemampuan membeli komoditas ‘kecil’, yaitu kemampuan individu untuk membeli barang-barang kebutuhan keluarga sehari-hari (beras, bahan bakar gas, minyak goreng, bumbu dan lain-lain) dan kebutuhan dirinya (minyak rambut, sabun mandi, rokok, bedak, sampo dan lain-lain). Setiap Individu dianggap mampu melakukan kegiatan ini terutama jika membuat keputusan sendiri tanpa meminta ijin pasangannya.
- ✓ Kemampuan membeli komoditas ‘besar’: kemampuan individu untuk membeli barang-barang sekunder atau tersier, seperti lemari pakaian, TV, radio, koran, majalah, pakaian keluarga. Seperti halnya indikator di atas, poin tinggi diberikan terhadap individu yang dapat membuat keputusan sendiri tanpa meminta ijin pasangannya; terlebih jika ia dapat membeli barang-barang tersebut dengan menggunakan uangnya sendiri.
- ✓ Terlibat dalam pembuatan keputusan-keputusan rumah tangga, mampu membuat keputusan secara sendiri maupun bersama suami/istri mengenai keputusan-keputusan keluarga, misalnya mengenai renovasi rumah, memperoleh kredit usaha ataupun aktivitas lain.
- ✓ Kebebasan relatif dari dominasi keluarga: responden ditanya mengenai apakah dalam satu tahun terakhir ada seseorang (suami, istri, anak-anak, mertua) yang mengambil uang, tanah, perhiasan dari dia tanpa ijinnya; yang melarang mempunyai anak; atau melarang bekerja di luar rumah.
- ✓ Kesadaran hukum dan politik, misalnya mengetahui nama pegawai pemerintah desa/kelurahan, anggota DPRD setempat; nama presiden; mengetahui pentingnya memiliki surat nikah dan hukum-hukum waris dan sebagainya.

- ✓ Keterlibatan dalam kampanye dan protes-protes: seseorang dianggap 'berdaya' jika ia pernah terlibat dalam kampanye atau bersama orang lain melakukan protes, misalnya, terhadap suami yang memukul istri; istri yang mengabaikan suami dan keluarganya; gaji yang tidak adil; penyalahgunaan bantuan sosial; atau penyalahgunaan kekuasaan polisi dan pegawai pemerintah.
- ✓ Jaminan ekonomi dan kontribusi terhadap keluarga: memiliki rumah, tanah, asset produktif, tabungan. Seseorang dianggap memiliki poin tinggi jika ia memiliki aspek-aspek tersebut secara sendiri atau terpisah dari pasangannya.

Sedangkan Suharto (2006 : 64 – 66) mengemukakan bahwa pemberdayaan mempunyai indikator-indikator yang digunakan untuk mengetahui fokus dan tujuan pemberdayaan secara operasional.

Indikator pemberdayaan tersebut adalah :

- a. Kebebasan mobilitas
- b. Kemampuan membeli komoditas kecil
- c. Kemampuan membeli komoditas besar
- d. Terlibat dalam pembuatan keputusan-keputusan rumah tangga
- e. Kebebasan relatif dari dominasi keluarga
- f. Kesadaran hukum dan politik
- g. Keterlibatan dalam kampanye dan protes-protes
- h. Jaminan ekonomi dan kontribusi terhadap keluarga.

Dari pengertian dan indikator-indikator tersebut, pemberdayaan dalam perspektif pekerjaan sosial mempunyai tingkatan-tingkatan sebagai berikut :

- 1) dari tidak berdaya menjadi berdaya,

- 2) setelah berdaya kemudian menguat
- 3) setelah menguat lalu dikembangkan.

Pekerjaan sosial dalam upaya pemberdayaan tidak berhenti pada pencapaian kemampuan individu untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari tetapi lebih pada peningkatan kapasitas individu tersebut agar mampu melaksanakan fungsi sosialnya.

Bank Dunia (2002 : 11) mengartikan pemberdayaan sebagai “Empowerment is the expansion of assets and capabilities of poor people to participate in, negotiate with, influence, control, and hold accountable institutions that affect their lives”. Bank Pembangunan Asia atau Asian Development Bank (ADB) tahun 2007 mengatakan bahwa “pemberdayaan dianggap komprehensif apabila menampilkan lima karakteristik, yaitu :

1. berbasis lokal
2. berorientasi pada peningkatan kesejahteraan,
3. berbasis kemitraan,
4. Bersifat holistik
5. berkelanjutan”

2.1.4. Pengertian Kampung Keluarga Berencana (Kampung KB)

Menurut Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Jawa Barat tahun 2016 Pengertian Kampung KB adalah satuan wilayah setingkat RW atau dusun yang memiliki kriteria tertentu dimana terdapat keterpaduan program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) dan pembangunan sektor terkait yang dilaksanakan secara sistemik dan sistematis. Kampung KB bukan hanya melibatkan Dinas KB saja, namun juga melibatkan seluruh Dinas instansi terkait untuk bersama-sama

meningkatkan kualitas hidup masyarakat terutama masyarakat yang berada di daerah-daerah pinggiran, perbatasan, terpencil dan juga wilayah nelayan.

Ruang lingkup pelaksanaan kampung KB, antara lain Kependudukan, Keluarga Berencana, Ketahanan Keluarga dan Pemberdayaan Keluarga, serta kegiatan lintas sektor (bidang pemukiman, sosial ekonomi, kesehatan, pendidikan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan lain-lain).

Menurut pedoman yang dikeluarkan oleh Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) tahun 2016, tujuan adanya kampung KB terdiri dari tujuan umum dan tujuan khusus.

Tujuan umum dibentuknya Kampung KB ini adalah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tingkat kampung atau yang setara melalui program Kependudukan, Keluarga Berencana, Ketahanan Keluarga dan Pemberdayaan Keluarga (KKBPK) serta pembangunan sektor terkait lainnya dalam rangka mewujudkan keluarga kecil berkualitas serta untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, peran pemerintah, lembaga non pemerintah serta swasta dalam melaksanakan program Kependudukan, Keluarga Berencana, Ketahanan Keluarga dan Pemberdayaan Keluarga (KKBPK) sesuai dengan kebutuhan dan kondisi wilayah.

Sedangkan secara khusus adalah

1. Meningkatkan komitmen mitra dan stakeholder
2. Meningkatkan peran serta masyarakat
3. Meningkatkan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) program KKBPK kepada sasaran dan masyarakat
4. Meningkatkan koordinasi, kerjasama dan terintegrasi program
5. Meningkatkan kualitas data dan informasi keluarga

6. Meningkatkan cakupan program KKBPK
7. Serta terbinanya peserta KB aktif dalam mengaplikasikan 8 (delapan) fungsi keluarga yang meliputi (1) fungsi keagamaan, (2) fungsi sosial budaya, (3) fungsi cinta kasih, (4) fungsi perlindungan, (5) fungsi reproduksi, (6) fungsi sosialisasi dan pendidikan, (7) fungsi ekonomi dan (8) fungsi pembinaan lingkungan.

2.1.5 Pemberdayaan Kampung Keluarga Berencana (KB)

Menurut Presiden RI Joko Widodo dalam penancangan Kampung KB, kedepannya Kampung KB akan menjadi ikon program kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga (KKBPK). Karena kehadiran Kampung KB bertujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tingkat kampung atau yang setara melalui program KKBPK serta pembangunan sektor lain dalam rangka mewujudkan keluarga kecil berkualitas.

Prinsipnya Program KKBPK mewujudkan keluarga kecil bahagia sejahtera dengan melaksanakan delapan fungsi keluarga. Penerapan fungsi keluarga ini membantu keluarga lebih bahagia dan sejahtera, terbebas dari kemiskinan, kebodohan dan keterbelakangan. Keberhasilan program KKBPK dapat dilihat dari beberapa aspek. Pertama, aspek pengendalian kuantitas penduduk, kedua, aspek peningkatan kualitas penduduk yang dalam hal ini diukur dengan peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarganya.

Menurut Pedoman BKKBN provinsi Jawa Barat tahun 2016 disebutkan Peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga dapat ditelusur melalui berbagai indikator yang merupakan pencerminan dari pelaksanaan delapan fungsi keluarga. Hal tersebut tercantum dalam Peraturan Pemerintah No 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana

dan Sistem Informasi Keluarga. Dalam PP disebutkan delapan fungsi keluarga meliputi (1) fungsi keagamaan, (2) fungsi social budaya, (3) fungsi cinta kasih, (4) fungsi perlindungan, (5) fungsi reproduksi, (6) fungsi sosialisasi dan pendidikan, (7) fungsi ekonomi dan (8) fungsi pembinaan lingkungan.

Kampung KB juga merupakan wujud dari pelaksanaan agenda prioritas pembangunan Nawacita ke 3, 5, dan 8. Nawacita ketiga yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Nawacita kelima yaitu meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta Nawacita kedelapan yaitu melakukan revolusi karakter bangsa melalui kebijakan penataan kembali kurikulum pendidikan nasional dengan mengedepankan aspek pendidikan kewarganegaraan, yang menempatkan secara proporsional aspek pendidikan, seperti pengajaran sejarah pembentukan bangsa, nilai-nilai patriotisme dan cinta Tanah Air, semangat bela negara dan budi pekerti di dalam kurikulum pendidikan Indonesia. Kampung KB menjadi program inovatif yang strategis dalam mengejawantahkan program KKBPK secara paripurna di lapangan. Pasalnya, Kampung KB menjadi model atau miniatur pembangunan yang melibatkan seluruh sektor di masyarakat.

Dengan kata lain Kampung KB tak hanya berbicara soal membatasi ledakan penduduk, tapi juga memberdayakan potensi masyarakat agar berperan nyata dalam pembangunan. Manfaat lain adalah membangun masyarakat berbasis keluarga, menyejahterakan masyarakat, serta memenuhi kebutuhan masyarakat melalui pelaksanaan integrasi program lintas sektor. Pembangunan lintas sektor dan kemitraan melibatkan peran bernagai pihak seperti swasta, provider, dan pemangku kepentingan lainnya. Integrasi lintas sektor berupa pelayanan terpadu antar sektor yang menjadi kebutuhan masyarakat, seperti pelayanan KB,

pelayanan pembuatan akta, pembangunan jalan dan jembatan, pembuatan ktp, pendiaan buku-buku bacaan, posyandu, PAUD, P2WKSS, dll.

2.1 6. Kriteria Wilayah Kampung KB

Tidak semua kampung mendapatkan program Kampung KB. Tetapi ada kriteria yaitu kriteria utama, kriteria wilayah dan kriteria khusus . Kriteria utama adalah sebuah kampung harus memiliki syarat-syarat seperti jumlah keluarga miskin diatas rata-rata tingkat desa dimana Kampung/RW tersebut berada. Bagi yang membentuk setara Desa, jumlah keluarga miskin di Desa tersebut harus diatas rata-rata Kecamatan dimana Desa itu berada. Selain itu, syarat utama lainnya adalah pencapaian KB di desa tersebut sangat rendah.

Sedangkan kriteria wilayah setiap kampung KB harus memenuhi unsur seperti berada di wilayah kumuh, kampung pesisir atau nelayan, berada di Daerah Aliran Sungai (DAS), di daerah bantaran Kereta Api, Kawasan Miskin (termasuk miskin perkotan), Terpencil, Wilayah Perbatasan, Kawasan Industri, Kawasan Wisata, Tingkat Kepadatan Penduduk Tinggi.

Selanjutnya kriteria khusus, dibutuhkan intervensi lintas sektor. Kampung KB wajib memiliki unsur antara lain pendidikan rendah dan infrastruktur kurang memadai. Untuk memenuhi kriteria tersebut, intervensi sangat diperlukan dari sektor lain..

Pada dasarnya ada tiga hal pokok yang dapat dijadikan bahan pertimbangan sebagai syarat dibentuknya Kampung KB dalam suatu wilayah, yaitu :

Pertama, tersedianya data kependudukan yang akurat.

Kedua, dukungan dan komitmen Pemerintah Daerah.

Ketiga, partisipasi aktif masyarakat

Dalam memilih atau menentukan wilayah yang akan dijadikan lokasi Kampung KB ada tiga kriteria yang dipakai, yaitu :

1. **Kriteria utama:** yang mencakup dua hal, yaitu: (1) Jumlah Keluarga Pra Sejahtera dan KS 1 (miskin) di atas rata-rata Pra Sejahtera dan KS 1 tingkat desa/kelurahan di mana kampung tersebut berada, (2) jumlah peserta KB di bawah rata-rata pencapaian peserta KB tingkat desa/kelurahan di mana kampung KB tersebut berlokasi.
2. **Kriteria wilayah:** yang mencakup 10 kategori wilayah (dipilih salah satu), yaitu: (1) Kumuh, (2) Pesisir, (3) Daerah Aliran Sungai (DAS), (4) Bantaran Kereta Api, (5) Kawasan Miskin (termasuk Miskin Perkotaan), (6) Terpencil, (7) Perbatasan, (8) Kawasan Industri, (9) Kawasan Wisata, (10) Padat Penduduk. Selanjutnya dalam menentukan kriteria wilayah yang akan dijadikan sebagai lokasi pembentukan Kampung KB dapat dipilih satu atau lebih dari sepuluh kriteria yang ada.
3. **Kriteria Khusus:** yang mencakup 5 hal, yaitu: (1) kriteria data di mana setiap RT/RW memiliki Data dan Peta Keluarga, (2) kriteria kependudukan di mana angka partisipasi penduduk usia sekolah rendah, (3) kriteria program KB di mana peserta KB Aktif dan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) lebih rendah dari capaian rata-rata tingkat desa/kelurahan serta tingkat *unmet need* lebih tinggi dari rata-rata tingkat desa/kelurahan, (4) kriteria program pembangunan keluarga di mana partisipasi keluarga dalam pembinaan ketahanan keluarga, pemberdayaan ekonomi dan partisipasi remaja dalam kegiatan GenRe melalui PIK-R masih rendah, (5) kriteria program pembangunan sektor terkait yang mencakup setidaknya empat bidang, yakni kesehatan,

ekonomi, pendidikan, pemukiman dan lingkungan, dan masih bisa ditambah dengan program lainnya sesuai dengan perkembangan.

2.1 7 Sasaran Kegiatan Kampung KB

Sasaran kegiatan yang merupakan subyek dan obyek dalam pelaksanaan kegiatan operasional pada Kampung KB selain keluarga. PUS, lansia, dan remaja juga keluarga yang memiliki balita, keluarga yang memiliki remaja dan keluarga yang memiliki lansia.

Sedangkan sasaran sektoral disesuaikan dengan bidang tugas masing-masing yang pelaksananya adalah Kepala Desa/Lurah, Ketua RW, Ketua RT, PKB, Petugas lapangan sektor terkait, TP PKK, kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) dalam hal ini PPKBD dan Sub PPKBD, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokohagamat, tokoh pemuda serta kader pembangunan lainnya.

Dalam pedoman Pelatihan Peningkatan Kompetensi Program KKBPK bagi Penyuluh KKBPK tahun 2018 terdapat sasaran kampung KB setiap tahun sejak tahun 2015 sampai tahun 2019.

1. Sasaran tahun 2015 : - konsep kampung KB sebagai prioritas disetujui oleh Presiden RI Joko Widodo. Alokasi anggaran pencaanangan mulai dimasukan di dalam usulan RKA.K/L
2. Sasaran tahun alam 2016
 - Target pembentukan Kampung KB dalam rencana kerja BKKBN TA 2016 adalah “Satu Kampung KB per Kabupaten/Kota”
 - Penganangan Kampung KB di Cirebon oleh Presiden RI Joko Widodo pada tanggal 14 Januari 2016
 - Penyusunan payung hukum (Perpres) tentang Kampung KB
 - Indikator KKBPK tercapai 100 %

- Indikator Lintas sektor bidang tercapai 70 %
 - Muatan Lokal sesuai kebutuhan masyarakat
3. Sasaran tahun 2017
- Terbentuknya satu kampung KB di setiap Kecamatan
 - Indikator KKBPK tercapai 100 %
 - Indikator lintas sektor bidang tercapai 80 %
 - Muatan Lokal sesuai kebutuhan masyarakat
4. Sasaran tahun 2018
- Terbentuknya satu kampung KB di 50 % desa Miskin
 - Indikator KKBPK tercapai 100 %
 - Indikator lintas sektor bidang tercapai 90 %
 - Muatan Lokal sesuai kebutuhan masyarakat
5. Sasaran tahun 2019
- Terbentuknya satu kampung KB di setiap desa miskin
 - Indikator KKBPK tercapai 100 %
 - Indikator lintas sektor bidang tercapai 100 %
 - Muatan Lokal sesuai kebutuhan masyarakat

2.1 8 Pengentasan Kemiskinan

2.1.8.1 Definisi Kemiskinan

Menurut Soegijoko (1997:137) Kemiskinan menunjukkan situasi serba kekurangan yang terjadi bukan karena dikehendaki oleh si miskin, melainkan karena tidak bisa dihindari dengan kekuatan yang dimilikinya. Sedangkan pemikiran mengenai kemiskinan berubah sejalan dengan berlalunya waktu, tetapi pada dasarnya berkaitan dengan ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar (Mikelsen, 2003:194).

Kemiskinan adalah keadaan di mana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah global. Sebagian orang memahami istilah ini secara subyektif dan komparatif, sementara yang lainnya melihatnya dari segi moral dan evaluatif, dan yang lainnya lagi memahaminya dari sudut ilmiah yang telah mapan, dll. Kemiskinan dipahami dalam berbagai cara. Pemahaman utamanya mencakup:

- Gambaran kekurangan materi, yang biasanya mencakup kebutuhan pangan sehari-hari, sandang, perumahan, dan pelayanan kesehatan. Kemiskinan dalam arti ini dipahami sebagai situasi kelangkaan barang-barang dan pelayanan dasar.
- Gambaran tentang kebutuhan sosial, termasuk keterkucilan sosial, ketergantungan, dan ketidakmampuan untuk berpartisipasi dalam masyarakat. Hal ini termasuk pendidikan dan informasi. Keterkucilan sosial biasanya dibedakan dari kemiskinan, karena hal ini mencakup masalah-masalah politik dan moral, dan tidak dibatasi pada bidang ekonomi. Gambaran kemiskinan jenis ini lebih mudah diatasi daripada dua gambaran yang lainnya.
- Gambaran tentang kurangnya penghasilan dan kekayaan yang memadai. Makna "memadai" di sini sangat berbeda-beda melintasi bagian-bagian politik dan ekonomi di seluruh dunia. Gambaran tentang ini dapat diatasi dengan mencari objek penghasilan di luar profesi secara halal.

Menurut Sar A. Levitan dalam Ala (1981:3) menyatakan kemiskinan adalah kekurangan barang-barang dan pelayanan-pelayanan yang dibutuhkan untuk mencapai suatu standar hidup yang layak. Sedangkan menurut Badan Pusat Statistik dan Departemen Sosial (2002:3-4) kemiskinan adalah ketidakmampuan individu dalam memenuhi kebutuhan dasar minimum untuk hidup layak. Kemiskinan adalah tidak hanya terpenuhinya makanan dasar, perlindungan, perawatan medis, pengamanan, kebiasaan berpikir yang dilandaskan pada nilai kebebasan manusia. akan tetapi, lebih luas dikatakan bahwa sesungguhnya, kemiskinan adalah keadaan memaksakan kehendak kepada orang lain. Kemiskinan dapat diartikan pencabutan penghubung. ”sosial (definisi penghubung) dan kemiskinan juga didasarkan pada budaya lokal ketika menghendaki menyelesaikan problem lokal.

Definisi kemiskinan sering dihubungkan dengan konsep keluarga, penyandang dana, pengurusan pajak-pajak, dan hak sebagai hasil dari upaya kerja. Kemiskinan adalah ketidak adaan yaitu seseorang yang tidak mempunyai perlindungan, makanan, kesehatan, dan keselamatan. Ini terlepas apakah miskin karena faktor internal maupun faktor eksternal.

Ukuran-ukuran Kemiskinan, berdasarkan Biro Pusat Statistik BPS menentukan seorang disebut miskin manakala mendapatkan (2100 kalori per hari), Sayogyo mengukur dengan 1 kg beras per hari) Sedangkan World Bank (\$1 per hari). Ukuran di Amerika disebut miskin manakala pendapatannya \$ 17.050 atau lebih dari 150.000 rupiah.

2.1.8.2 Penyebab Kemiskinan

Penyebab kemiskinan dapat terjadi karena kondisi alamiah dan ekonomi, kondisi struktural dan sosial, serta kondisi kultural (budaya). Kemiskinan alamiah dan ekonomi timbul akibat keterbatasan sumber daya alam, manusia, dan sumberdaya lain sehingga peluang produksi relatif kecil dan tidak dapat berperan dalam pembangunan. Kemiskinan struktural dan sosial disebabkan hasil pembangunan yang belum merata, tatanan kelembagaan dan kebijakan dalam pembangunan. Sedangkan kemiskinan kultural (budaya) disebabkan sikap atau kebiasaan hidup yang merasa kecukupan sehingga menjebak seseorang dalam kemiskinan (Nugroho dan Dahuri, 2004:167-168; Soegijoko, 1997:137; dan Nasution, 1996: 48-50).

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Proppenas menyebutkan berdasarkan penyebabnya kemiskinan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu kemiskinan kronis (*chronic poverty*) yang disebabkan:

1. sikap dan kebiasaan hidup masyarakat yang tidak produktif;
 2. keterbatasan sumber daya dan keterisolasian; dan
- rendahnya taraf pendidikan dan derajat kesehatan, terbatasnya lapangan kerja, dan ketidakberdayaan masyarakat, dan kemiskinan sementara (*transient poverty*) yang disebabkan perubahan siklus ekonomi dari kondisi normal menjadi krisis ekonomi;
 - perubahan yang bersifat musiman seperti kasus kemiskinan nelayan dan pertanian tanaman pangan; dan
 - bencana alam atau dampak dari suatu kebijakan.

Penyebab utama kemiskinan desa adalah:

1. pendidikan yang rendah;
2. ketimpangan kepemilikan modal dan lahan pertanian;
3. ketidakmerataan investasi di sektor pertanian;
4. alokasi anggaran kredit yang terbatas;
5. terbatasnya ketersediaan bahan kebutuhan dasar;
6. pengelolaan ekonomi secara tradisional;
7. rendahnya produktivitas dan pembentukan modal;
8. budaya menabung yang belum berkembang;
9. tidak adanya jaminan sosial bagi masyarakat desa; dan
10. rendahnya jaminan kesehatan.

Pembagian jenis kemiskinan dapat dibagi berdasarkan pola waktu. Menurut Ginandjar Kartasasmita dalam Ridlo (2001:11), menurut pola waktu tersebut kemiskinan dapat dibagi menjadi:

Persistent poverty, yaitu kemiskinan yang telah kronis atau turun temurun yang diantaranya merupakan daerah kritis sumber daya alam atau terisolasi.

1. Cyclical poverty yaitu kemiskinan yang mengikuti pola siklus ekonomi secara keseluruhan.
2. Seasonal poverty, yaitu kemiskinan musiman seperti sering dijumpai kasus-kasus nelayan dan petani tanaman pangan.
3. Accidental poverty, yaitu kemiskinan karena bencana alam atau dampak dari suatu kebijakan.

Berdasarkan jenisnya kemiskinan secara umum dapat dibagi menjadi kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Kemiskinan absolut terjadi apabila tingkat pendapatan seseorang di bawah garis kemiskinan absolut yang telah

ditetapkan, sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum yang antara lain terdiri dari kebutuhan sandang, pangan, kesehatan, perumahan dan pendidikan. Sedangkan kemiskinan relatif merupakan perbandingan antara kelompok pendapatan dalam masyarakat tersebut. Meskipun seseorang/masyarakat telah dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara layak (tidak miskin), tetapi masih rendah kualitasnya dibandingkan masyarakat sekitarnya yang relatif lebih kaya (Soegijoko, 1997:138; dan Esmara (1986) dalam Ridlo (2001:10)

2.1.8.3 Indikator dan Ukuran Kemiskinan

Ukuran dan Indikator kemiskinan dibedakan antara kemiskinan absolut dengan kemiskinan relatif.

1) Indikator dan Ukuran Kemiskinan Absolut

Indikator kemiskinan yang dikemukakan BKKBN (2003:25) adalah: untuk keluarga pra sejahtera terdiri dari: seluruh anggota keluarga tidak bisa makan dua kali sehari atau lebih; tidak memiliki pakaian yang berbeda untuk dirumah, bekerja, sekolah dan bepergian; bagian lantai terluas dari tanah. Sedangkan indikator kemiskinan untuk keluarga sejahtera I terdiri dari: seminggu sekali keluarga tidak selalu dapat makan daging/ikan/telur; belum tentu setahun sekali anggota keluarga memperoleh minimal satu stel pakaian baru; lantai rumah kurang dari 8 m² untuk tiap penghuni.

Indikator kemiskinan yang lain dikemukakan oleh Bappenas (2004) dalam Sahdan (2005) berupa:

1. kurangnya pangan, sandang dan perumahan yang tidak layak;
2. terbatasnya kepemilikan tanah dan alat-alat produktif;

3. kurangnya kemampuan membaca dan menulis;
4. kurangnya jaminan dan kesejahteraan hidup;
5. kerentanan dan keterpurukan dalam bidang sosial dan ekonomi;
6. ketidakberdayaan atau daya tawar yang rendah; dan
7. akses terhadap ilmu pengetahuan yang terbatas. Mubyarto (2002) berpendapat bahwa penduduk miskin bukanlah orang yang tidak mempunyai apa-apa, tetapi memiliki serba sedikit modal sosial untuk mengembangkan diri.s

2) Ukuran dan Indikator Kemiskinan Relatif

Kemiskinan relatif menunjukkan ketidakmerataan pendapatan antara seseorang dengan orang lain dalam suatu kelompok atau satu kelompok dengan kelompok masyarakat yang lain. Bank Dunia menggunakan ukuran ketidakmerataan sebagai berikut: Tingkat ketidakmerataan tinggi bila 40% penduduk terbawah menerima kurang dari 12% jumlah pendapatan. Tingkat ketidak merataan sedang bila menerima antara 12 - 17%. Tingkat ketidakmerataan rendah bila menerima lebih dari 17% (Rusli dkk., 1995:15).

2.1.8.4 Strategi dan Program Pengentasan Kemiskinan

Upaya penanggulangan kemiskinan menurut Undang Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Propenas ditempuh melalui dua strategi utama. Pertama, melindungi keluarga dan kelompok masyarakat yang mengalami kemiskinan sementara. Kedua, membantu masyarakat yang mengalami kemiskinan kronis dengan memberdayakan dan mencegah terjadinya kemiskinan baru. Strategi tersebut selanjutnya dituangkan dalam tiga program yang langsung diarahkan

pada penduduk miskin yaitu: 1) Penyediaan Kebutuhan Pokok; 2) Pengembangan Sistem Jaminan Sosial; dan 3) Pengembangan Budaya Usaha Masyarakat Miskin.

Kebijakan pengentasan kemiskinan di Indonesia yang terbaru tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, yang menyatakan bahwa kebijakan penanggulangan kemiskinan meliputi: kebijakan pemenuhan hak-hak dasar dan kebijakan pembangunan wilayah untuk mendukung pemenuhan hak dasar. Sepanjang kebijakan pemerintah belum dapat mengatasi kemiskinan, masyarakat miskin mempunyai strategi sendiri untuk mengatasi kemiskinannya dengan cara: berhutang pada berbagai sumber pinjaman informal, bekerja serabutan, istri dan anak turut bekerja, memanfaatkan sumber daya alam di sekelilingnya, bekerja di luar daerah, dan berhemat melalui mengurangi atau mengganti jenis makanan dan mengatur keuangan.

2.1.8.5 Teori Dan Macam-Macam Kemiskinan

Dari definisi kemiskinan dan data-data kemiskinan yang dapat penulis himpun dan paparkan dalam makalah ini, selanjutnya akan menyajikan tentang teori kemiskinan, yang muncul berdasarkan ragam pengertian kemiskinan itu sendiri. Sedikitnya ada lima Teori Kemiskinan (Theory Of Poverty), yang dapat penulis kemukakan dalam kesempatan makalah ini. Literatur tentang kemiskinan saat ini secara keseluruhan telah mengakui adanya perbedaan teori-teori tentang kemiskinan, tetapi literatur tersebut telah mengelompokan teori-teori tersebut dalam kelompok yang berbeda-beda (bandingkan blank, 2003; Goldsmith dan Blokely, 1992; Jennings dan Kushnick, 1999; Rodgers, 2000; Schiller, 1989; Shaw 1996). Sebenarnya semua pengarang membedakan teori-teori tentang penyebab kemiskinan berasal dari kelemahan-kelemahan individu, dan teori yang

menyatakan bahwa kemiskinan disebabkan oleh fenomena sosial (liberal atau progresif). Reyan (1976) menunjuk perbedaan tersebut sebagai "kemiskinan yang timbul akibat dari kesalahan mereka sendiri". Gold Smith dan Blakely, sebagai contoh membedakan kemiskinan sebagai penyakit dengan kemiskinan yang timbul akibat ketidak sengajaan dan kecelakaan dan kemiskinan sebagai sebuah struktur. Schiller (1989, hal 2-3) menjelaskan dalam istilah karakter-karakter merusak yang dimiliki, kesempatan yang terbatas dan timbulnya KKN. Jennings (1999) meninjau varian-varian individual dengan konsepsi sosial, memberikan tekanan pada perkembangan rasial dan politik. Pendapat Rank sangat jelas : tudingan bahwa atribut-atribut yang dimiliki individu sebagai penyebab kemiskinan adalah salah alamat.

Kegagalan struktural dalam sistem politik, ekonomi, sosial adalah penyebab yang lebih nyata (Rank,2004 hal 50).

1. Kemiskinan individu.

Teori pertama terdiri dari serangkaian penjelasan bahwa individu bertanggung jawab atas kemiskinan yang dialaminya. Secara umum, para pencetus teori ini, yang berhaluan konservatif menyalahkan individu akan kemiskinan yang dialaminya dengan menyatakan bahwa mereka menciptakan masalah bagi diri mereka sendiri dan dengan pilihan yang tepat, kemiskinan dapat dihindari (dan hal itu juga dapat berulang, variasi lain dari teori ini adalah kemiskinan berasal dari buruknya komunitas genetik seperti tingkat intelegensi yang tidak memadai).

Keyakinan bahwa kemiskinan berasal dari individu sudah lama timbul. Doktrin yang menyamakan kekayaan berasal dari kemurahan Tuhan adalah inti dari ajaran Reformasi Protestan. (Weber,2001) dan

orang buta, pincang, atau cacat adalah diyakini sebagai hukuman dari Tuhan atas dosa-dosa yang dilakukan oleh orang tuanya. Dengan munculnya teori Intelegensi turunan pada abad ke-19, aliran genetik berubah menjadi memandang kemiskinan secara rasional dan aliran itu perlahan-lahan menghilang khususnya pandangan terhadap mereka yang memiliki kemampuan terbatas. Buku-buku seperti *The Bell Curve* (1994) hasil karya dari Herrnstein dan Murray adalah pendekatan modern dari penjelasan tersebut diatas. Rainwater (1970, hal 16) secara kritis membahas teori individualistis dalam kemiskinan sebagai "Perspektif moral" dan memberi catatan bahwa orang miskin adalah orang yang menderita yang diukur dengan tanda Cain. Mereka ditakdirkan untuk menderita, sungguh-sungguh harus menderita, karena kebobrokan mental mereka. Mereka hanya berhak untuk hidup di neraka di atas bumi.

Teori ekonomi yang menyatakan bahwa orang miskin kekurangan dorongan untuk mengembangkan kondisi mereka adalah tema pada artikel-artikel yang cenderung menyalahkan sistem kesejahteraan yang memberi santunan kepada para orang miskin. Pada artikel di jurnal *Cato*, ahli ekonomi Gwartney dan McCaleb berpendapat bahwa selama bertahun-tahun perang melawan kemiskinan justru semakin meningkatkan angka kemiskinan itu sendiri (didasarkan pada pengiriman uang tidak secara tunai) pada orang dewasa yang bekerja karena tidak adanya hal yang bisa dijadikan teladan dalam pengeluaran yang digunakan untuk kesejahteraan. Mereka menyimpulkan bahwa penerapan dari sistem ekonomi yang sederhana menjelaskan bahwa masalah yang terdapat dalam perang melawan kemiskinan adalah : Mereka (Program Kesejahteraan)

telah memperkenalkan perlawanan terhadap struktur rangsangan , suatu hal yang dapat menghambat perkembangan diri dan melindungi anti-individu sebagai konsekuensi dari pilihan salah yang mereka pilih. (1985, hal 7).

Hal ini dan pendapat-pendapat yang serupa yang menyatakan bahwa si miskin adalah resiko moral ”juga menyatakan bahwa masalah kemiskinan berlanjut menjadi lebih buruk bukan karena kita tidak cukup melakukan sesuatu, akan tetapi karena kita terlalu banyak melakukan sesuatu yang sia-sia” (Gwartney dan McCaleb, 1985 hal15).Model pendekatan ekonomi mereka akan memecahkan masalah kemiskinan dengan mengasumsikan bahwa penalty terhadap orang miskin cukup ampuh sehingga membuat orang tidak akan memilihnya (dan sistem kesejahteraan dibatasi bagi mereka yang menderita cacat atau dengan kata lain tidak mampu bekerja).

Versi kritik yang sedikit lebih besar dari teori kemiskinan individualistis berasal dari nilai-nilai individual orang Amerika – mitos Horatio Alger bahwa setiap individu dapat meraih kesuksesan dengan ketrampilan dan kerja keras, dan motivasi dan ketekunan yang diperlukan untuk meraih kesuksesan (lihat Asen, 2002, hal 29-34). Literature bantuan sendiri memperkuat kepercayaan bahwa kegagalan individu dikarenakan karena mereka tidak mencoba dengan keras. Frank Bettger (1977, hal 187-188) dalam tradisi Dale Carnegie, menjelaskan bagaimana dia mendapat daftar tujuan perbaikan sendiri yang memfokuskan dan menjadialah satu salesman yang paling sukses dan bayaran termahal di Amerika. Dia terus mengatakan bahwa setiap orang dapat meraih sukses dengan sebuah

formula yang mudah – memfokuskan pada tujuan dan kerja keras. Dengan ekstensi literature ini mengimplikasikan bahwa orang-orang yang tidak sukses harus menghadapi fakta bahwa mereka sendiri bertanggung jawab atas kegagalan mereka sendiri.

2. Kemiskinan kultural

Akar teori kedua kemiskinan itu sendiri menyebabkan “Kultur Kemiskinan”. Teori ini kadang-kadang berkaitan dengan teori kemiskinan individu atau teori-teori lain yang akan diperkenalkan sebagai berikut, tetapi saat ini teori itu telah meluas untuk di diskusikan bahwa fitur spesialnya seharusnya tidak diminimalisir. Teori ini menyarankan bahwa kemiskinan diciptakan oleh transmisi antar generasi dari kumpulan kepercayaan, nilai-nilai, dan kerampilan yang secara sosial akan tetapi dilakukan secara individual. Individu tidak perlu untuk dipersalahkan karena mereka korban dari disfungsi subkultur dan kultur mereka sendiri.

Sosilog Amerika telah lama terpesona oleh subkultur para imigran dan juga para penghuni yahudi sebagaimana kekayaan dan kekuatan mereka. Kultur secara social dijalankan dan di abadikan, merefleksikan interaksi individual dan komunitas. Interaksi social tersebut membuat teori “Kultur Kemiskinan” berbeda dari teori “Individual” yang secara eksplisit berkaitan dengan kemiskinan bagi kemampuan individu dan motivasi. Secara teknis, kultur kemiskinan adalah subkultur orang-orang miskin di perkampungan, daerah-daerah miskin atau konteks social dimana mereka mengembangkan kumpulan pembagian kepercayaan, nilai-nilai dan norma-norma untuk tingkah laku yang terpisah tapi melekat pada kultur masyarakat utama.

Oscar Lewis adalah salah satu penulis utama untuk mendefinisikan kultur kemiskinan sebagai kumpulan kepercayaan dan nilai-nilai yang diwariskan dari generasi ke generasi. Dia menulis, *Sekali kultur kemiskinan telah ada dan menjadi nyata maka kemiskinan itu cenderung akan diabadikan sendiri. Dengan berjalannya waktu anak-anak miskin sekitar enam atau tujuh mereka biasanya akan menyerap tingkah laku dasar dan nilai-nilai subkultur mereka. Yang kemudian secara psikologis tidak siap untuk mengambil manfaat penuh dari perubahan kondisi atau perbaikan kesempatan yang mungkin dapat berkembang dalam kehidupan mereka. (Scientific American, Oktober 1966 dikutip dalam Ryan, 1976, hal 120).*

Kultur-kultur disosialisasikan dan dipelajari, dan salah satu penyewa pembelajaran teori adalah dengan memberikan penghargaan bagi orang-orang yang mempelajari apa yang ditujukan. Teori kultur kemiskinan adalah program anti kemiskinan pemerintah menganugerahi orang-orang memanipulasi kebijakan untuk bertahan pada kemakmuran. Dasar argumen konservatif seperti Charles Murray dalam *Losing Ground* (1984) adalah kemakmuran pemerintah yang mengabadikan kemiskinan dengan mengizinkan sebuah siklus “Penurunan Kemakmuran” dimana keluarga miskin berkembang dan mewariskan ketrampilannya kepada yang lain untuk mengerjakan system dari pada untuk mendapatkan pembayaran kerja. Hasil jaringan teori kemiskinan ini digabungkan oleh Asen (2002 hal 48) dalam frase perseptif, “dari perang kemiskinan menuju perang kemiskinan”.

Teori kemiskinan ini berdasarkan pada pengabdian nilai-nilai cultural yang penuh dengan kontroversi. Tidak seorangpun yang memisahkan bahwa orang-orang miskin memiliki subkultur atau bahwa sub kultur dari orang-orang miskin adalah Perbedaan dan mungkin detrimental.

Usaha ini melebihi apakah penyebab-penyebab dan hukum-hukum menjadi bagian sub kultur kekayaan. Daniel Patrick Moynihan menemukan konsep utama yang dapat diaplikasikan untuk pembelajarannya dari kekayaan Black dari awal tahun 1960an dan di kaitkan dengan kekayaan Black untuk secara luas "yang tidak dapat berfungsi" di dalam keluarga Afrika Amerika yang ditemukan di pusat kota. Valentine (1968, hal 20) mengkritisi E. Franklin Frazier, yang dengan Daniel Patrick Mynihan (1965) menjabarkan budaya orang miskin negro sebagai sebuah "Kekacauan Imoral yang di bawa oleh dis integrasi bangsa dan budaya kulit hitam dibawah tekanan arus urbanisasi"

Dalam situasi sub kultur penjelasan budaya orang miskin adalah lebih bersifat simpatik atau menarik. Contohnya: banyak pelajar-pelajar dari kaum liberal memahami problematika kultur bahwa orang amerika asli mencoba berhadapan untuk menyatu dengan sistem dari golongan dari kelas menengah. Secara berlawanan, setelah banyak generasi yang kita sebut dengan pergerakan "kepahlawanan" dari kelompok imigran italia atau suku Irish dan kemauan mereka untuk menerima bekerja keras dan berusaha untuk mencapai tujuan jangka panjang mereka di bidang sosial ekonomi. Kita melupakan diskriminasi budaya yang mereka hadapi untuk menghindari ketidakcocokan dari mulai generasi mereka datang. Sekarang

ini, sub kultur memberikan penghargaan bagi pendidikan yang lebih tinggi dan kewirausahaan antara kelompok imigran India dan Asia adalah diberikan sebuah contoh bagaimana subkultur dapat bekerja di kelompok-kelompok yang bervariasi untuk mencoba menghilangkan kekayaan.

3. Kemiskinan struktur politik dan ekonomi

Dimanapun teori kemiskinan pertama "individualistik di advokasi oleh para pemikir konservatif dan yang kedua adalah melalui pendekatan budaya liberal, yang ketiga adalah dimana kita tahu teori sosial terbaru. Para penteoris didalam tradisi ini melihat tidak kepada individu sebagai sumber dari kemiskinan tetapi dari sisi ekonomi, politik dan sistem sosial yang menyebabkan seseorang mempunyai kesempatan yang terbatas dan sumber-sumber lain dengan usaha untuk mendapatkan pendapatan dan penghidupan yang layak.

Penelitian dan teori ini menekankan kepada problematika yang sering terjadi yang dicatat oleh Rank, Yoon, & Hirschl : "Para peneliti kemiskinan memiliki dampak yang difokuskan kepada siapa yang kehilangan sumber-sumber ekonomi, lebih banyak daripada mengacu kepada fakta bahwa usaha-usaha produksi kalah dalam tempat pertama" (2003, p.5

Pada abad ke-19 intelektual sosial mengembangkan sebuah pergerakan yang kuat pada teori individu dengan menjabarkan bagaimana sistem sosial dan ekonomi dikembangkan dan dikreasikan dengan situasi kemiskinan individu. Sebagai contoh, Marx, menunjukkan bagaimana sistem ekonomi kapitalis dikembangkan dengan sistem pengamanan bagi para pengangguran sebagai strategi yang dicanangkan untuk menjaga tegaknya undang-undang. Kemudian Durkheim, menunjukkan bahkan tindakan-tindakan personil/ tingkahlaku adalah

menjadi faktor perantara bagi sistem sosial. Diskriminasi dipisahkan dari ketrampilan seseorang setelah yang lainnya, menjadikan kesempatan sebagai perantara sosial. Didapatkan pada sebuah sistem yang ekstrim, pemikir-pemikir radikal memberikan argumen bahwa sistem ini diluncurkan dan secara radikal harus ditransformasikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. (1993). Manajemen. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Bintarto, R. Dr.1983. Interaksi Desa-Kota.Yogyakarta: Ghalia Indonesia.
- BKKBN, 2018, Kumpulan Materi dan Bahan Ajar, Bandung
- Danu Wisakti, Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa Di Wilayah Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan, Magister Ilmu Administrasi Negara, UNDIP, 2008.
- Fattah, Nanang.(2013). Landasan Manajemen Pendidikan.Bandung : Remaja Rosda Karya
- Hernowo, Basah. 2010 Kajian Pembangunan Ekonomi Desa Untuk Mengatasi Kemiskinan.Dalam www. Bappenas.go.id.
- Kartasasmita,Ginandjar, 2001. Pembangunan Untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan Dan Pemerataan,Jakarta : Pustaka CIDESINDO.
- Mardiasmo (2002) Otonomi Dan Manajemen Daerah.Yogyakarta.
- Ndraha, Taliziduhu, 1984, Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa, Jakarta : PT. Bina Aksara.
- Remi, Sutyastie Soemitro dan Prijono Tjiptoherijanto. 2002. ***Kemiskinan dan Ketidakmerataan di Indonesia***. Jakarta: Penerbit Rineka Cipta.
- Soegijoko, Budi Tjahjati S. dan BS Kusbiantoro (ed). 1997. ***Bunga Rampai Perencanaan Pembangunan di Indonesia***. Bandung : Yayasan Soegijanto Soegijoko.
- Undang-Undang Republik Indonesia No 22 Tahun1999 Tentang Pemerintahan Desa
- Widjaja, HAW.(2001). Pemerintahan Desa Berdasarkan UU No 22 Tahun 1999 Tentang pemerintah daerah.
- Widjaja,HAW.2004. Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli Bulat dan Utuh.Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada.

BAB IV

JADWAL KEGIATAN

Kegiatan pengabdian akan dilaksanakan dalam jangka waktu 2 bulan. Jadwal kegiatan pengabdian disusun mulai dari penyusunan proposal sampai dengan tahap pelaporan hasil kegiatan pengabdian.

1. Penyusunan proposal kegiatan dilakukan sebagai tahap pertama pengajuan program pengabdian masyarakat.
2. Persiapan pelatihan yang dilakukan meliputi pengumpulan dan penyusunan materi-materi pelatihan.
3. Pelatihan yang akan dilakukan meliputi metode ceramah, tutorial, diskusi dan dilanjutkan dengan kegiatan pendampingan.
4. Pelaporan hasil kegiatan akan dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kegiatan.

Tabel 2. Rencana Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat

Uraian	November				Desember				Januari 2019			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Penyusunan proposal												
Persiapan Pelatihan												
Pelaksanaan Pelatihan												
Monitoring												
Pelaporan												

BAB V
ANGGARAN PEMBELANJAAN PENGABDIAN

Rencana anggaran biaya terdiri dari empat komponen pembiayaan yaitu :

Nomor	Jenis Pengeluaran	Persentase	Biaya yang diusulkan (Rp)
1	Bahan habis pakai dan ATK	40 %	2.400.000
2	Honor	30 %	1.800.000
3	Biaya Perjalanan	15 %	900.000
4	Pelaporan	15 %	900.000
	J u m l a h	100 %	6.000.000

Untuk lebih merasionalkan usulan kegiatan pengabdian, biaya dibuat lebih terinci sesuai dengan keadaan harga di pasaran pada saat ini. Biaya ini disusun untuk jumlah peserta pelatihan an sebanyak 20 orang.

BAB III

MATERI DAN METODE PELAKSANAAN

3.1 Kerangka Pemecahan Masalah

Permasalahan utama berkaitan dengan masalah ini adalah:

1. Kurangnya pembinaan dan pelayanan secara terintegrasi lintas sektor terhadap peningkatan kesertaan ber KB di Desa Tenggerraharja Kecamatan Sukamantri Kabupaten Ciamis.
2. Kurangnya pendidikan/pelatihan untuk para kader dalam meningkatkan 8 (delapan) fungsi keluarga di Desa Tenggerraharja Kecamatan Sukamantri Kabupaten Ciamis.
3. Kurangnya penyuluhan untuk memahami konsep dan teknis pembentukan Kampung KB dalam melaksanakan berbagai kegiatan lintas sektor di Desa Tenggerraharja Kecamatan Sukamantri Kabupaten Ciamis.

3.2 Realisasi Pemecahan Masalah

Usulan pemecahan yang bersifat operasional dalam kegiatan pengabdian ini adalah sebagai berikut.

1. Memberikan pemahaman pentingnya pembinaan dan pelayanan secara terintegrasi lintas sektor terhadap peningkatan kesertaan ber KB di Desa Tenggerraharja Kecamatan Sukamantri Kabupaten Ciamis.
2. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan/pelatihan untuk para kader dalam meningkatkan 8 (delapan) fungsi keluarga di Desa Tenggerraharja Kecamatan Sukamantri Kabupaten Ciamis.
3. Menyelenggarakan kegiatan penyuluhan untuk memahami konsep dan teknis pembentukan Kampung KB dalam melaksanakan berbagai

kegiatan lintas sektor di Desa Tenggerraharja Kecamatan Sukamantri Kabupaten Ciamis.

3.3 Khalayak sasaran

Khalayak sasaran yang dipilih adalah para pengurus Kampung Keluarga Berencana (KB) yang terdiri dari Pengurus Kelompok Kerja (Pokja) dan para pengurus Kelompok Kegiatan (Poktan) yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan program Kampung KB di Desa Tenggerraharja Kecamatan Sukamantri Kabupaten Ciamis.

Dengan pelatihan yang akan diberikan, diharapkan dapat memberikan bekal pengetahuan dan keterampilan berbagai kegiatan yang disampaikan dari berbagai lintas sektor lintas instansi, sehingga dapat memperkuat basis perekonomian masyarakat. Lebih lanjut, pengetahuan dan ketrampilan yang diperoleh diharapkan dapat disampaikan ke masyarakat sekitarnya sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih besar untuk meningkatkan perekonomian keluarga sehingga lebih cepat bisa mengurangi kemiskinan.

3.4 Metode yang digunakan

Pelaksanaan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat ini dilakukan dengan menggunakan metode ceramah, tutorial, dan diskusi. Adapun tahapan pelaksanaan kegiatan pengabdian ini adalah sebagai berikut:

1. Langkah 1 (Metode Ceramah):

Peserta diberikan wawasan mengenai pentingnya program Kampung KB disampaikan berbagai program dari berbagai lintas sektor. Langkah pertama dengan melalui metode ceramah selama 1,5 jam.

2. Langkah 2 (Metode Tutorial):

Peserta pelatihan diberikan materi peningkatan 8 (delapan) fungsi keluarga dengan sasaran kelompok kerja dan kelompok kegiatan . Materi ini disampaikan dalam bentuk tutorial disertai dengan latihan/studi kasus. Langkah kedua diselenggarakan selama 5 jam.

3. Langkah 3 (Metode Diskusi):

Peserta pelatihan diberikan kesempatan untuk mendiskusikan permasalahan yang berkaitan dengan penyusunan program, pelaksanaan program sampai evaluasi pelaksanaan program di lapangan, apakah ada kendala atau tidak. Langkah ketiga diselenggarakan selama 1,5 jam.

Disamping langkah 1, 2, dan 3 di atas, akan dilakukan kegiatan pendampingan untuk menyusun laporan berbagai aktifitas kelompok kerja dan kelompok kegiatan masyarakat kampung KB selama 6 jam dengan jadwal menyesuaikan peserta khalayak sasaran sehingga jumlah waktu untuk pengabdian masyarakat terpenuhi.

Akhirnya diharapkan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kampung KB sebagai Upaya Penanggulangan kemiskinan di Desa Tenggerraharja Kecamatan Sukamantri Kabupaten Ciamis bisa berhasil dengan baik.

3.5. Rancangan Evaluasi

Kegiatan Pengabdian ini akan dievaluasi melalui kuesioner untuk mengetahui peningkatan pengetahuan manajemen keuangan yang akan didistribusikan sebelum dan sesudah kegiatan.

Selain itu, melalui kegiatan pendampingan yang dilakukan setelah pelatihan, tingkat keberhasilan kegiatan pengabdian ini juga dapat diketahui.

Berikut ini disajikan tabel evaluasi program pengabdian ini.

Tabel 1. Rancangan Evaluasi Pelatihan

Tujuan	Indikator Ketercapaian	Tolok Ukur
Peserta memiliki pengetahuan tentang Pembentukan Kampung KB	Pengetahuan tentang Pembentukan Kampung KB peserta pelatihan meningkat	Peserta memahami Pembentukan Kampung KB peserta pelatihan meningkat
Peserta mampu melaksanakan berbagai kegiatan lintas sektor di kampung KB	Peserta mampu melaksanakan berbagai kegiatan lintas sektor di kampung KB	Masyarakat melaksanakan berbagai kegiatan lintas sektor di kampung KB
Peserta memahami dan meningkatkan kemampuan 8 (delapan) fungsi keluarga	Peserta mampu memberi penyuluhan meningkatkan kemampuan 8 (delapan) fungsi keluarga	Peserta pelatihan bisa mengimplementasikan meningkatkan kemampuan 8 (delapan) fungsi keluarga

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

Desa Tenggerraharja kecamatan Sukamantri terletak sekitar 56 kilometer sebelah Utara Ibu Kota Kabupaten Ciamis. Luas wilayah Desa Tenggerraharja kecamatan Sukamantri seluas 591,854 Ha. Terdiri dari lahan sawah, lahan pemukiman, dan lahan pemukiman. Lahan darat terdiri dari tanah kering ladang dan pekarangan, perkantoran dan perkebunan serta luas prasarana umum lainnya. Bentangan lahan daerah Desa Tenggerraharja terdiri dari daerah dataran 26 Ha dan daerah perbukitan 836, 853 Ha. Sehingga sebagian besar luas lahan daerah Tenggerraharja merupakan daerah berbukit-bukit. Sedangkan kategori kesuburan tanah terdiri dari :

- Sangat subur 75 Ha
- Subur 325 Ha
- Sedang 397 Ha
- Tidak subur 55,853 Ha

Secara topografis Desa Tenggerraharja kecamatan Sukamantri mempunyai ketinggian tempat 800 meter di atas permukaan laut (mdpl). Iklim Desa Tenggerraharja kecamatan Sukamantri bervariasi dengan suhu maksimal 22⁰C dan suhu minimum 19⁰C.

Wilayah Desa Tenggerraharja kecamatan Sukamantri secara administratif berbatasan dengan desa Werasari Kecamatan Malausma Kab. Majalengka sebelah utara, desa Payung Agung Kec. Panumbangan sebelah selatan, desa Hujungtiwu Kec. Panjalu sebelah timur dan desa Sindangbarang Kec. Panumbangan sebelah barat.

Desa Tenggerraharja kecamatan Sukamantri merupakan pemerintah desa yang banyak membawahi dusun-dusun, yaitu terdiri dari 5 dusun, yakni:

Tabel 4.1
Daftar nama dusun di Desa Tenggeraharja kecamatan Sukamantri

No	Nama Dusun	Luas Wil	Jumlah		Jml Penduduk	Jml Penduduk/ km	Ket
			RT	RW			
1	Tengger	185,000	4	2	523	2,49	Ketinggian dari permukaan laut 800 mdpl
2	Cikareo	289,008	5	2	640	2,19	
3	Bojong	145,000	4	2	488	3,40	
4	Cihonje	146,007	4	2	562	3,67	
5	Ciputih	87,839	4	2	393	4,97	
		591,854	21	10	2606	16,72	

Sumber: Monografi Desa Tenggeraharja tahun 2018

Berdasarkan tabel 4.1 di atas, Desa Tenggeraharja kecamatan Sukamantri terdiri atas lima dusun yakni dusun Tengger, Cikareo, Bojong, Cihonje dan Ciputih.

Mengenai rincian data demografis Desa Tenggeraharja kecamatan Sukamantri dapat di sajikan dalam tabel 4.2 di bawah ini:

Tabel 4.2
Jumlah Penduduk

No	Penduduk	Jumlah
	Laki-Laki	1.305
2	Perempuan	1.301
3	Jumlah Total	2.606
4	Jumlah Kepala Keluarga (KK)	869
5	Kepadatan Penduduk (jiwa/KM ²)	16,72

Sumber: Monografi Desa Tenggeraharja tahun 2018

Berdasarkan tabel 4.2 di atas, diketahui jumlah penduduk di Desa Tenggeraharja kecamatan Sukamantri terdiri atas 1.305 laki-laki, 1.301 perempuan, sehingga jumlah total penduduk sebanyak 2.606 dari jumlah Kepala Keluarga (KK) sebanyak 869 KK dan kepadatan hanya 16,72 jiwa/KM². Mungkin karena daerahnya merupakan perbukitan jadi lahan disini masih luas lahan pertanian daripada pemukiman.

Sedangkan untuk komposisi usia penduduk Desa Tenggeraharja kecamatan Sukamantri adalah sebagai berikut:

Tabel 4.3

Komposisi usia penduduk Desa Tenggerraharja

No	Golongan Usia	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Ket
1	0 – 12 bulan	27	26	53	
2	1 - 4 Tahun	61	60	121	
3	5 – 6 Tahun	39	36	75	
4	7 – 12 Tahun	83	84	167	
5	13 – 15 Tahun	51	53	104	
6	16 – 18 Tahun	43	44	87	
7	19 – 25 Tahun	128	132	260	
8	26 – 35 Tahun	155	154	309	
9	36 - 45 Tahun	161	163	324	
10	46 – 50 tahun	75	72	147	
11	51 - 60 tahun	154	155	309	
12	61 -- 75 tahun	245	241	486	
13	➤ 76 tahun	83	81	164	
14	Jumlah	1.305	1.301	2.606	

Sumber: Monografi Desa Tenggerraharja tahun 2018

Berdasarkan tabel 4.3 di atas, diketahui jumlah penduduk di Desa Tenggerraharja lebih banyak usia produktif, dan jumlah berdasarkan jenis kelamin hampir seimbang.

Sedangkan untuk data rincian pekerjaan atau mata pencaharian masyarakat Desa Tenggerraharja kecamatan Sukamantri dapat dilihat pada tabel 4.4 berikut:

Tabel 4.4
Rincian pekerjaan/mata pencaharian masyarakat Desa Tenggerraharja.

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah (Orang)	Keterangan
1	Pegawai Negeri Sipil	6	
2	Buruh Tani	636	
3	Pensiunan	6	
4	Petani	289	
5	Pedagang	57	
6	Buruh Tukang	103	
7	Buruh Perusahaan Swasta	42	
8	Jompo	107	
9	Lain-lain	64	
10	Jasa Warung	46	
11	Jasa Toko	2	
12	Tukang Kayu	9	
13	Tukang Batu	6	
14	Tukang Jahit	11	
15	Tukang Cukur	1	

Monografi Desa Tenggerraharja tahun 2018

Berdasarkan tabel di atas, diketahui kebanyakan masyarakat di Desa Tenggerraharja kecamatan Sukamantri bekerja sebagai buruh tani, yaitu sebanyak 636 orang, disusul sebagai petani sebanyak 289 orang. Hal ini disebabkan karena potensi daerah tersebut yang relatif subur dan merupakan daerah yang berbukit-bukit, sehingga baik sekali untuk bercocok tanam.

Sedangkan untuk mengetahui tingkat pendidikan masyarakat Desa Tenggerraharja kecamatan Sukamantri dapat dilihat pada tabel 4.5 berikut:

Tabel 4.5
Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Tenggerraharja

No	Tingkat pendidikan	Jumlah	Ket
1	Belum sekolah	307	
2	TK/ PAUD	70	
3	SLTP	294	
4	SLTA	133	
5	SMU/ SMK	50	
6	Perguruan Tinggi	10	
7	Pondok Pesantren	32	

Sumber: Monografi Desa Tenggerraharja tahun 2018

Berdasarkan tabel di atas, diketahui masih rendahnya tingkat pendidikan masyarakat di Desa Tenggerraharja kecamatan Sukamantri. Hal ini terlihat dari jumlah lulusan Perguruan Tinggi hanya mencapai 10 orang, sedangkan pendidikan SMP mencapai 294 orang. Hal ini disebabkan selain jauh ke tempat sekolah, juga karena masalah biaya yang kurang memadai untuk menyekolahkan anaknya ke jenjang yang lebih tinggi.

B. PEMBENTUKAN KAMPUNG KB

Dasar pembentukan Kampung KB berawal dari arahan Presiden RI tanggal 29 September 2015 bertempat di BKKBN. Kemudian ditindaklanjuti pengembangan Kampung KB di seluruh Kabupaten dan Kota seluruh Indonesia dengan acara Pencanangan Kampung KB oleh Presiden RI tanggal 14 Januari 2016. Kampung KB merupakan salah satu kegiatan prioritas yang sesuai dengan instruksi Presiden RI, terutama sebagai bentuk investasi Program KB yang manfaatnya dapat secara langsung diterima oleh masyarakat.

Proses terbentuknya Kampung KB di Desa Tenggerraharja dipilih Dusun Cihonje, hal ini dilakukan tidak terlepas dari tahapan yang telah dilakukan sebelumnya, yaitu :

1. Rapat persiapan tingkat Desa, Kecamatan dan Kabupaten
2. Workshop tingkat Kabupaten
3. Rapat Koordinasi tingkat Desa dan tingkat Kecamatan
4. Pelatihan Kader
5. Sarasehan pendataan
6. Operasionalisasi Kampung KB
7. Pembinaan Kader dan kelompok sasaran
8. Intervensi program dan kunjungan ke rumah-rumah binaan
9. Bimbingan teknis, monitoring, Evaluasi dan Review (bulanan dan tahunan)
10. Pencatatan dan pelaporan

Dalam kegiatan Kampung KB di desa Tenggerraharja dibentuk POKJA (Kelompok Kerja) untuk mempermudah koordinasi antar pengurus. Kelompok kerja ini disesuaikan dengan kondisi, kebutuhan, kemampuan dan situasi lain yg diinginkan di wilayah masing-masing, namun tetap tujuannya mengacu pada 8 fungsi keluarga.

Adapun kepengurusan Pokja Kampung KB di Desa Tenggerraharja adalag sebagai berikut:

Pembina	: Camat Sukamantri
Ketua	: Kepala Desa (Endang Dahrimi)
Sekretaris	: Imas Mulyati
Bendahara	: Oon Maryani
Seksi Keagamaan	: Aang Hujaemi
Seksi Sosial Budaya	: Nursandi
Seksi Cinta Kasih	: Ai Winda
Seksi Perlindungan	: Teten J
Seksi Reproduksi	: Yati
Seksi Pendidikan	: Dede CA
Seksi Ekonomi	: Usepudin
Seksi Pembinaan Lingkungan	: Enung Sumiati

Program Kampung KB ini merupakan bagian dari usaha-usaha pengentasan kemiskinan, sehingga dampaknya akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Hal ini terbukti dari usaha-usaha yang dilakukan sebagai berikut :

1. Pendewasaan usia Perkawinan
2. Pengaturan Kelahiran
3. Pemantapan Ketahanan Keluarga
4. Pemberdayaan Ekonomi Keluarga
5. Pengendalian, pemantauan, pengamatan serta pembinaan penduduk.

Demikian pula kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat merupakan kegiatan yang terpadu oleh seluruh lapisan masyarakat seperti Kepala Desa, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Karang Taruna, PKK, Tokoh remaja, Akademisi dll. Hal ini menunjukkan perannya sbb :

1. Memahami dan menghayati tentang Kampung KB

2. Bersedia menjadi pengurus Pokja Kampung KB
3. Mengintegrasikan program organisasinya dengan kegiatan Kampung KB
4. Bersama-sama mengusahakan dana dan sarana ke berbagai pihak untuk kepentingan Kampung KB
5. Membina dan mengembangkan kampung KB secara berkelanjutan
6. Mempromosikan potensi kampung KB baik profesi, produk unggulan ke pasar niaga

Berbagai kegiatan yang dilaksanakan di Kampung KB bukan hanya masalah KB tapi kegiatan terpadu dari setiap instansi yang ada di Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis. Hal ini terbukti kegiatan yang sudah disusun dalam tabel berikut :

I. Bidang Kependudukan

No	Indikator Pendataan Keluarga	Instansi Terkait	Ket
1	Pemilikan NIK	Disdukcapil, Camat, Kades, RW, RT	
2	Anak Usia Sekolah/ Tidak Sekolah	Dinas Pendidikan	
3	Penduduk usia Kerja/ Tidak Bekerja	Disnaker, KADIN, Swasta	
4	Kesertaan dalam Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	Dinkes, BPJS, Camat, Kades, RW dan RT	

Pengurus Pokja Kampung KB harus membantu masyarakat binaan bersama instansi terkait diatas dalam mengatasi masalah bidang Kependudukan, sehingga masyarakat yang kesulitan merasa ada yang membantu dan memperhatikan.

II. Bidang Keluarga Berencana

No	Indikator Pendataan Keluarga	Instansi Terkait	Ket
----	------------------------------	------------------	-----

1	Usia Kawin Pertama	Disdik, KB, Kemendag, TOMA, TOGA, Tokoh Adat, Dinkes, Camat, Kades, RW, RT	
2	Jumlah Anak	Dinkes, KB, Ormas	
3	Kesertaan KB	KB, Dinkes, PKK, TOMA, TOGA, TODAT, KB	
4	PUS Hamil	Dinkes, PKK, BPJS, Camat, Kades, RW dan RT	
5	Pemakaian Kontrasepsi	Dinkes, PKK, BPJS, Camat,	
6	Ketersediaan sarana pelayanan KB	Dinkes, KB, Swasta	
7	Pembiayaan pelayanan KB	Dinkes, KB, Swasta	
8	Ketidaksuburan/ Infertilitas	Dinkes, KB, Swasta	

Setiap masyarakat binaan di Kampung KB harus diperhatikan dan dilayani setiap hal yang berhubungan dengan Bidang Keluarga Berencana, jangan sampai indikator-indikator di atas luput dari perhatian pengurus Pokja Kampung KB, apalagi pelayanan keikutsertaan dalam ber KB.

III. Bidang Pembangunan Keluarga

No	Indikator Pendataan Keluarga	Instansi Terkait	Ket
1	Kemampuan keluarga membeli pakaian baru	Disnaker, Dinsos, Swasta, Kelg mampu	
2	Memiliki pakaian berbeda untuk berbagai keperluan	Disnaker, Dinsos, Swasta, Kelg mampu	
3	Kemampuan menyediakan makan	Camat, Dinsos, Swasta, Kelg mampu	
4	Pkemampuan mengkonsumsi daging/ikan/telur	Dinkes, PKK, Dinsos, Camat, Kades, RW dan RT	
5	Kemampuan berobat ke fasilitas kesehatan	Dinkes, Dinsos, BPJS, Camat,	
6	Kemampuan memiliki tabungan	Perbankan, Koperasi dan UKM	
7	Kebiasaan komunikasi dalam keluarga	LSM, TOMA, TOGA, TODAT, PKK	
8	Kemampuan mengakses informasi, melalui TV, radio, internet dll	Kominfo, komunitas radio, Swasta, camat, kades, RT, RW	
9	Kemampuan mempunyai Balita ikut Pos Yandu	Dinkes, KB, PKK, Swasta, Camat, Kades, RT, RW	

10	Keluarga mempunyai Balita ikut BKB	Dinkes, KB, PKK, Swasta, Camat, Kades, RT, RW	
11	Keluarga mempunyai Remaja ikut BKR	Dinkes, KB, PKK, Swasta, Camat, Kades, RT, RW	
12	Remaja ikut PIKR	Dinkes, KB, PKK, Swasta, Camat, Kades, RT, RW	
13	Keluarga mempunyai Lansia ikut BKL	Dinkes, KB, PKK, Swasta, Camat, Kades, RT, RW	
14	Keluarga ikut kegiatan UPPKS	Dinkes, KB, PKK, Swasta, Camat, Kades, RT, RW	
15	Atap, dinding, lantai rumah	Dinas perumahan, camat, kades, LSM, ormas	
16	Sumber Penerangan	PLN, kades	
17	Bahan bakar memasak	Pertamina, Kades	
18	Sumber air minum	Dinas kesehatan, Kades, PU	
19	Fasilitas MCK	Dinas PU, Dinkes, Dinsos, Kades	

Dengan demikian seluruh instansi yang ada di pemerintah daerah setempat ikut terlibat mendukung berbagai kegiatan untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dan kualitas pembangunan di Kampung KB yang terletak di Dusun Cihonje Desa Tenggeraharja Kecamatan Sukamantri.

B. Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian

1. Pemberdayaan Masyarakat Desa Melalui Kampung KB Sebagai Upaya Penanggulangan Kemiskinan.

Masalah kemiskinan merupakan masalah yang umum di negara kita dan penanggulangannya di setiap daerah berbeda tergantung dari situasi dan kondisi daerah dan upaya-upaya yang dilakukan oleh setiap daerah. Untuk menanggulangi masalah kemiskinan di desa Tenggerraharja kecamatan Sukamantri Kabupaten Ciamis, salah satu cara yang dilakukan yakni dengan pemberdayaan masyarakat melalui dibentuknya Kampung KB, diharapkan keseluruhan masyarakat desa dapat mengoptimalkan aktivitasnya dalam menggerakkan roda perekonomian desa, sehingga pembangunan desa akan semakin meningkat. Pembangunan yang meningkat ini diharapkan akan memacu percepatan pengentasan kemiskinan.

Kegiatan pengabdian ini diikuti oleh seluruh lapisan masyarakat, baik perangkat desa, pengurus Kelompok Kerja Kampung KB dan seluruh keluarga Binaan di Kampung KB desa Tenggerraharja kecamatan Sukamantri kabupaten Ciamis.

Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian yang dilakukan oleh penulis di desa Tenggerraharja kecamatan Sukamantri kabupaten Ciamis berupa:

- 1) Memberikan pemahaman pentingnya keterlibatan seluruh lapisan masyarakat dalam setiap program kegiatan yang dilaksanakan demi terwujudnya masyarakat yang makmur dan sejahtera di Desa Tenggerraharja Kecamatan Sukamantri Kabupaten Ciamis.
- 2) Menyelenggarakan kegiatan pelatihan manajemen organisasi secara sederhana untuk para pengurus Kelompok Kerja Kampung KB di Desa Tenggerraharja Kecamatan Sukamantri Kabupaten Ciamis.
- 3) Menyelenggarakan kegiatan pelatihan berbagai aktivitas yang menunjang bidang agama, budaya, kesehatan, ekonomi, pendidikan dan keterampilan serta lingkungan hidup masyarakat yang berada di daerah binaan Kampung KB di Desa Tenggerraharja Kecamatan Sukamantri Kabupaten Ciamis.

Pelaksanaan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat ini dilakukan dengan menggunakan metode ceramah, tutorial, dan diskusi. Adapun tahapan pelaksanaan kegiatan pengabdian ini adalah sebagai berikut:

1) Langkah 1 (Metode Ceramah):

Peserta diberikan wawasan mengenai pentingnya keterlibatan pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan program pembangunan sesuai pedoman yang telah diatur oleh pemerintah dalam Juklak (Petunjuk Pelaksanaan) atau Juknis (Petunjuk Teknis). Program Kampung KB ini merupakan program Unggulan yang namanya tidak boleh diganti dengan yang lain.

Langkah pertama dengan melalui metode ceramah selama 1,5 jam.

2) Langkah 2 (Metode Tutorial):

Peserta pelatihan diberikan materi tentang Indikator Keberhasilan Kampung KB, meliputi berbagai kegiatan sesuai dengan pelaksanaan program. Materi ini disampaikan dalam bentuk tutorial disertai dengan latihan/studi kasus.

Langkah kedua diselenggarakan selama 5 jam.

3) Langkah 3 (Metode Diskusi dan Praktek):

Peserta pelatihan diberikan kesempatan untuk mendiskusikan permasalahan yang berkaitan dengan penyusunan program, pelaksanaan praktek dan kegiatan secara fisik sebagai Implementasi pelaksanaan program di lapangan.

Langkah ini diselenggarakan selama seminggu dan tiap hari dilaksanakan selama 3 jam

4) Kemudian dilakukan evaluasi, barangkali ditemukan ada kendala atau tidak.

Langkah ini diselenggarakan selama 1,5 jam.

Disamping langkah 1, 2, 3 dan 4 di atas, dilakukan juga kegiatan pendampingan atau kegiatan bersama penulis untuk mendapatkan kegiatan lebih akurat, baik dalam diskusi maupun praktek-praktek bersama para keluarga binaan di Kampung KB. Pelaksanaan

kegiatan disesuaikan dengan jadwal peserta khalayak sasaran sehingga jumlah waktu untuk pengabdian masyarakat terpenuhi.

2. Manajemen Organisasi Kelompok Kerja (Pokja) Kampung KB

Dalam pelaksanaan kegiatan yang tertera dalam Petunjuk Teknis Kampung KB terdapat struktur kepengurusan yang terdiri dari 8 seksi. Jumlah ini sesuai dengan 8 fungsi keluarga, sehingga diharapkan sasaran program tercapai. Adapun 8 seksi tersebut masing-masing mempunyai kegiatan sebagai berikut :

a. Seksi Agama : kegiatannya adalah :

- Menghimbau dan mengajak beribadah sesuai agama yang dianut masyarakat
- Meningkatkan kepedulian bagi masyarakat yang belum ikut dalam kegiatan keagamaan
- Menghimbau agar setiap keluarga memiliki ruangan ibadah
- Menumbuhkan rasa tenggang rasa dan kerukunan beragama
- Mengusahakan kebutuhan bidang keagamaan ke pemerintah lebih atas

b. Seksi Sosial Budaya, kegiatannya adalah :

- Menanamkan budaya budi pekerti dan tatakrama dalam keluarga
- Memelihara dan mengembangkan tradisi yang baik
- Membentuk kelompok seni sesuai dengan keinginan masyarakat
- Mengkampanyekan program pemerintah melalui seni budaya
- Mengajarkan bahasa yang santun dalam keluarga
- Menyelenggarakan lomba-lomba budaya di masyarakat
- Memfasilitasi hal-hal yang dibutuhkan bidang sosial budaya ke pemerintah lebih atas

c. Seksi Cinta Kasih, kegiatannya adalah :

- Menghimbau adanya iuran kesejahteraan, baik untuk menyumbang kebutuhan yang sakit maupun kematian
- Adanya kegiatan Donor Darah
- Adanya Jaminan ibu bersalin
- Menghimbau orangtua asuh bagi anak yang tidak mampu
- Menghimbau pengumpulan shodaqoh dan infak baik berupa barang maupun uang
- Mengusahakan bantuan ke pemerintah yang lebih atas

d. **Seksi Perlindungan**, kegiatannya adalah :

- Penyuluhan tentang anti KDRT, anti Narkoba dan anti jenis-jenis kejahatan lain
- Menghimbau dan mengurus kepemilikan jaminan kesehatan (BPJS)
- Mengaktifkan sistem ronda untuk keamanan lingkungan
- Adanya Lembaga Bantuan Hukum di masyarakat setempat
- Adanya jaminan yang mengalami keluhan atau komplikasi peserta KB
- Memfasilitasi pelayanan administrasi kependudukan
- Mengusahakan bantuan ke pemerintah yang lebih atas

e. **Seksi Reproduksi**, kegiatannya adalah

- Memotivasi pasangan usia subur (PUS) untuk ber KB
- Membina kelangsungan peserta KB
- Menyelenggarakan pembentkan, pembinaan dan pengembangan pos yandu
- Melaksanakan pelayanan KB
- Pembinaan terhadap keluarga Balita (BKB), keluarga Remaja (BKR)
- Melaksanakan rujukan dan pengayoman secara medis
- Memfasilitasi pelayanan papsmear, pemeriksaan ibu hamil dan pelayanan imunisasi di Pos Yandu
- Mengusahakan bantuan ke pemerintah yang lebih atas

f. **Seksi Pendidikan**, kegiatannya adalah :

- Membina dan mengembangkan kegiatan Bina Keluarga Balita (BKB)
- Membina dan mengembangkan kegiatan Bina Keluarga Remaja (BKR)
- Membina dan mengembangkan kegiatan Bina Keluarga Lansia (BKL)
- Membina dan mengembangkan kegiatan PAUD atau KOBER
- Membina dan mengembangkan kegiatan kursus-kursus (perbengkelan, tata rias, tata busana, kue-kue, servis HP dll)
- Membina keluarga Sadar Hukum (kadarkum)
- Mengusahakan bantuan ke pemerintah yang lebih atas

g. **Seksi Ekonomi**, kegiatannya adalah

- Membantu mempromosikan potensi/ profesi yang dimiliki warga masyarakat
- Membentuk dan mengembangkan usaha bersama, baik Koperasi maupun UMKM
- Menjalankan lumbung masyarakat
- Mengaktifkan pengumpulan modal bersama untuk kepentingan bersama
- Mengusahakan bantuan ke pemerintah yang lebih atas

h. **Seksi Pembinaan Lingkungan**, kegiatannya adalah

- Mengusahakan bantuan ke pemerintah yang lebih atas
- Memelihara lingkungan dengan kerja bakti
- Menghimbau gerakan masyarakat dalam pengelolaan halaman untuk meningkatkan ketahanan Pangan keluarga
- Pembuangan sampah secara teratur dan tertib
- Penataan jalan, gang, pagar atau lingkungan warga agar serasi dan indah
- Membuat petunjuk jalan atau gang
- Mengusahakan bantuan ke pemerintah yang lebih atas

3. Indikator Keberhasilan Kampung KB

Kampung KB merupakan ikon program unggulan dari Badan Keluarga Berencana Nasional, terutama ditujukan di daerah terpencil dan masyarakatnya dengan pendidikan rendah. Dengan kehadiran program Kampung KB diharapkan bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tingkat kampung disetiap sektor pembangunan, dan mewujudkan kualitas hidup yang lebih baik di tingkat keluarga kecil.

Kampung KB juga merupakan wujud dari Agenda Program prioritas Unggulan NawaCita yang ke 3, 5 dan 8.

- Program Nawacita yang ke 3 adalah membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
- Program Nawacita yang ke 5 adalah meningkatkan kualitas hidup masyarakat
- Program Nawacita yang ke 8 adalah melakukan revolusi karakter bangsa melalui kebijakan penataan kembali kurikulum pendidikan nasional dengan mengedepankan aspek pendidikan kewarganegaraan yang menempatkan secara proporsional aspek pendidikan, seperti pengajaran sejarah pembentukan bangsa, nilai-nilai patriotisme dan Cinta Tanah Air, semangat bela Negara dan budi pekerti di dalam kurikulum pendidikan Indonesia.

Dengan adanya Kampung KB diharapkan masyarakat merasakan manfaatnya yaitu membangun masyarakat berbasis keluarga, menyejahterakan masyarakat serta memenuhi kebutuhan masyarakat melalui pelaksanaan program-program pembangunan dari berbagai sektor.

Manfaat yang sangat diharapkan dari terbentuknya Kampung KB di Cihonje yaitu bisa mengentaskan kemiskinan dan mendekatkan pembangunan di setiap sektor kepada masyarakat. Masyarakat bisa langsung merasakan pelaksanaan program dari berbagai instansi yang terlibat, termasuk program pengabdian ini dari penulis. Kampung KB tidak hanya memperhatikan masalah ledakan penduduk yang pesat atau pelayanan ber KB tapi justru

lebih banyak memberdayakan potensi masyarakat agar berperan langsung dalam pembangunan.

Adapun Indikator-indikator sebagai tanda keberhasilan program Kampung KB adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya peserta KB aktif dari mulai dibentuk Kampung KB sampai saat ini
2. Meningkatnya kesertaan KB MKJP (Metode Kontrasepsi Jangka Panjang), hal ini karena menurunkan angka kelahiran secara total. (Total Fertility Rate). MKJP terdiri dari 2 macam yaitu MOP (Metode Operasi Pria) dan MOW (Metode Operasi Wanita)
3. Unmet need kurang dari 10 % jenis alat kontrasepsi. Artinya Pasangan Usia Subur (PUS) tidak menggunakan alat kontrasepsi
4. Terbinanya Pasangan usia subur paritas rendah (Pusmupar) dan terbinanya ibu habis masa persalinan (Postpartum)
5. Semua ibu hamil, ibu menyusui bisa mendapat pelayanan kesehatan
6. Semua anak usia dini 0 – 6 th bisa terlayani kesehatan dan pendidikan
7. Semua keluarga yang punya anak 0 – 6 tahun bisa mengikuti kegiatan BKB (Bina Kelarga Balita)
8. Semua anak usia 0 – 18 th sudah mendapatkan akte kelahiran
9. Semua remaja yang ada di kampung KB aktif mengikuti BKR (Bina Keluarga Remaja) dan PIKKRR (Pusat Informasi Konseling Kesehatan Reproduksi Remaja)
10. Meningkatnya partisipasi keluarga dalam kelompok UPPKS
11. Masyarakat yang Lansia mengikuti kegiatan BKL (bina Keluarga Lansia)
12. Lingkungan semakin baik dengan pelaksanaan PHBS (Pola Hidup Bersih dan Sehat)
13. Semua anak usia 7 – 12 th dan 13 – 15 tahun bersekolah
14. Tidak ada lagi masyarakat yang buta aksara

15. Pengangguran di Kampung KB menjadi Nihil karena masyarakat tergerak dengan berbagai aktivitas pemberdayaan yang menghasilkan uang untuk memenuhi kebutuhan ekonomi sehari-hari

16. Kekerasan Dalam Rumah Tangga juga tidak pernah terjadi lagi.

Dari indikator-indikator tersebut sangat kelihatan masyarakat menjadi lebih teratur kehidupannya. Diharapkan kualitas sumber daya manusia meningkat, maka kualitas keluarga juga semakin meningkat.

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sebagai penunjang kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Kampung KB diantaranya :

1. Membuat olahan makanan yang bahan bakunya merupakan hasil bumi di sekitar Kampung KB Cihonje, yaitu manisan labu besar dan kadapo
2. Pelatihan membuat kemasan agar lebih menarik dan memanfaatkan bahan baku di sekitar Kampung KB Cihonje
3. Donor Darah sebagai rasa kepedulian terhadap sesama manusia
4. Senam yang dilaksanakan oleh kelompok Lansia untuk meningkatkan kebugaran dan kesehatan tubuh
5. Pelayanan Kesehatan secara rutin baik kepada Balita, ibu Hamil, ibu menyusui, maupun kepada Lansia
6. Pelayanan KB kepada pesera Aktif KB

4. Mengatasi Faktor-Faktor yang Menghambat dalam Pemberdayaan Masyarakat di Kampung KB .

Pelaksanaan berbagai program di Kampung KB tidak selamanya mulus dan lancar, tapi dengan berjalannya waktu masih ditemukan berbagai hambatan yang ditemukan di lapangan. Kampung KB pada umumnya terbentuk di daerah yang ketimpangan sosialnya agak tinggi, misalnya kepadatan penduduk, keikutsertaan dalam

KB rendah, sektor pendidikan masyarakatnya rendah dan secara ekonomi penghasilannya masyarakatnya juga rendah.

Banyak alasan yang ditemui bagaimana partisipasi pemberdayaan masyarakat di Kampung KB Cihonje awalnya rendah.

- Jarak antara rumah ke rumah agak berjauhan sehingga komunikasi antar warga harus melalui speaker di mesjid.
- Kemudian kontur tanah yang berbukit-bukit untuk bepergian kemana saja masyarakat mungkin cape melalui jalan yang naik turun.
- Selain itu mata pencaharian masyarakat kebanyakan buruh tani, sehingga kalau ada kegiatan perkumpulan atau pembinaan harus menunggu mereka pulang dari sawah atau kebun.

Dengan pembinaan yang rutin dan kegiatan pengabdian penulis di Kampung KB semua hambatan bisa diatasi dan indikator-indikator keberhasilan di kampung KB semakin tampak jelas.

C. Evaluasi Kegiatan Pengabdian Penyuluhan

Dengan dilaksanakannya kegiatan pengabdian terhadap masyarakat Kampung KB Cihonje, di desa Tenggerraharja kecamatan Sukamantri diharapkan dapat membantu aparat desa dan Pengurus Kelompok Kerja Kampung KB dalam memajemen organisasi Kampung KB sehingga pengelolaan masyarakat agar dapat menanggulangi kemiskinan bisa cepat tercapai.

Dari kegiatan yang dilaksanakan berupa penyuluhan dengan metode ceramah, diskusi dan praktek dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Kampung KB desa Tenggerraharja, dalam hal ini manajemen organisasi Kelompok Kerja (Pokja), ternyata sangat bermanfaat bagi para pengurus maupun masyarakat secara umum di Dusun Cihonje Desa Tenggerraharja Kecamatan Sukamantri Kabupaten Ciamis.

Dalam melaksanakan tugasnya para pengurus mengadakan kegiatan di Bale Sawala yang biasa digunakan untuk pertemuan Pos Yandu, BKB, BKL ataupun kegiatan-kegiatan lain tingkat Dusun. Walaupun dengan keterbatasan perlengkapan atau alat kerja yang seadanya, tidak menyurutkan semangat untuk melaksanakan kegiatan.

Hasil dari evaluasi kegiatan pengabdian ini sangat membanggakan karena di akhir tahun 2018 dan awal 2019 para aparat desa dan Pengurus Kelompok Kerja Kampung KB di Cihonje desa Tenggerraharja kecamatan Sukamantri kabupaten Ciamis telah memahami bagaimana manajemen organisasi yang kecil dengan baik. Kemudian yang paling membanggakan adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan semakin meningkat, seperti pelayanan KB, ibu menyusui, pelayanan Balita maupun pelayanan untuk Lansia. Pelayanan kesehatan bukan saja secara medis, tapi dilaksanakan juga senam untuk para Lansia, jalan sehat maupun aktivitas lain yang menunjang terhadap kualitas hidup. Selain pelayanan kesehatan yang meningkat, bidang yang sangat digemari oleh masyarakat adalah bidang ekonomi. Hal ini dibuktikan dengan antusiasme masyarakat membuat olahan-olahan makanan yang tentu saja bisa dijual dan bisa menghasilkan pendapatan untuk meningkatkan keadaan ekonomi keluarga. Pengolahan makanan dan kerajinan lain semua menggunakan potensi-potensi yang ada di sekitar Kampung KB Cihonje.

Kegiatan pengabdian dilaksanakan dalam jangka waktu 2 bulan. Jadwal kegiatan pengabdian disusun mulai dari penyusunan proposal sampai dengan tahap pelaporan hasil kegiatan pengabdian.

1. Penyusunan proposal kegiatan dilakukan sebagai tahap pertama pengajuan program pengabdian masyarakat.
2. Persiapan pelatihan yang dilakukan meliputi pengumpulan dan penyusunan materi-materi pelatihan.
3. Pelatihan yang akan dilakukan meliputi metode ceramah, tutorial, diskusi dan dilanjutkan dengan kegiatan praktek atau pendampingan.

4. Pelaporan hasil kegiatan dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kegiatan.

Tabel 4.6
Time Schedule Pengabdian kepada Masyarakat

Uraian	Bulan					
	Des '18	Jan '19	Feb '19	Mar '19	Apr '19	Mei '19
Penyusunan proposal	✓					
Persiapan pengabdian		✓				
Pelaksanaan pengabdian			✓	✓		
Monitoring dan evaluasi					✓	
Pelaporan						✓

DOKUMENTASI KEGIATAN



BALAI SAWALA

KAMPUNG KB SAHURIP

Dusun Cihonje Desa Tenggerraharja Kecamatan Sukamantri



" KAMPUNG KB SAHURIP "

Kampung KB :

- * *Ngaronjatkeun ajen kampung ku jalan ngawangun lingkungan nu geunah , merenah tur tumaninah.*
- * *Ngatur ngandung nu rimbitan malar kulawarga mulus balung , ayem tengtrem.*
- * *Ngaronjatkeun ka parigelan warga sangkan luhur elmuna jembar hartana.*
- * *Ngaronjatkeun pancen, ngagem agama tur kabeungharan budaya*



AYO IKUT KB
2 Anak Cukup

STRUKTUR / SUSUNAN PENGURUS SATGAS TRAFFICKING DAN KDRT TP-PKK DESA TENGGERAHARJA

PEMBINA : KEPALA DESA
PENANGGUNG JAWAB : KAUR KESRA DESA
KETUA : KETUA TP-PKK DESA
WAKIL KETUA : KETUA POKJA 1 TP-PKK DESA
SEKRETARIS : POKJA I TP-PKK DESA
BENDAHARA : POKJA I TP-PKK DESA
SEKSI-SEKSI :

DATA INFORMASI DAN EDUKASI :
KETUA : PLKB/TPD
ANGGOTA : PPKBD ,SUB PPKBD

PENDAMPINGAN RUJUKAN PELAYANAN DAN PEMULIHAN :
KETUA : BIDAN DESA
ANGGOTA : KADER POSYANDU
POKJA II TP-PKK DESA

PENGUATAN JARINGAN KEMITRAAN :
KETUA : TOKOH MASYARAKAT/AGAMA
ANGGOTA :

**TENGGERAHARJA,
KEPALA DESA**

ENDANG DAHRIMI



STRUKTUR ORGANISASI KELOMPOK USAHA PENINGKATAN PENDAPATAN KELUARGA SEJAHTERA (UPPKS) "SAHURIP"



Dusun Cihonje RT 18 RW 09 Desa Tenggerrahaja
Kecamatan Sukamantri Kabupaten Ciamis



**STRUKTUR
KELOMPOK KERJA
" KAMPUNG KB SAHURIP "**
Dusun Cihonje, Desa Tengerraharja, Kecamatan Subamantri





STRUKTUR ORGANISASI KELOMPOK BINA KELUARGA REMAJA (BKR) "SAHURIP"



Dusun Cihonje RT 18 RW 09 Desa Tenggerraharja
Kecamatan Sukamantri Kabupaten Ciamis





STRUKTUR ORGANISASI KELOMPOK BINA KELUARGA LANSIA (BKL) "SAHURIP"



Dusun Cihonje RT 18 RW 09 Desa Tengerraharja
Kecamatan Sukamantri Kabupaten Ciamis



Menjadi Keluarga Yang Hebat



UPTD PAKBESA
Kecamatan Sukamantri





STRUKTUR ORGANISASI KELOMPOK BINA KELUARGA BALITA (BKB) "SAHURIP"



Dusun Cihonje RT 18 RW 09 Desa Tenggeraharja
Kecamatan Juhanantri Kabupaten Ciamis



REKAPITULASI HASIL PENDATAAN KAMPUNG KB "SAHURIP"

DUSUN CIHONJE DESA TENGGERRAHARJA KECAMATAN SUKAMANTRI - CIAMIS

NO.	URAIAN	RT 16		TOTAL	RT 17		TOTAL	RT 18		TOTAL	RT 19		TOTAL	JUMLAH		KETERANGAN
		SA	TEKAP		SA	TEKAP		SA	TEKAP		SA	TEKAP		SA	TEKAP	
KONDISI RUMAH																
I TATA RUANG BAMBUNAN																
1.	RUMAH BERBENTUK CIKUP	50	0	50	40	5	45	32	34	46	44	0	44	196	15	200
2.	RUMAH MENYUPUR SIWA MEX	13	38	50	15	29	45	3	43	46	34	39	44	45	140	200
3.	RUMAH DGR LINTA MEMACI	34	16	50	36	9	45	19	13	46	27	17	44	130	55	200
4.	RUMAH MENYUPUR BONGSA	35	20	50	33	12	45	36	30	46	40	4	44	189	45	200
5.	RUMAH MENYUPUR CALIN PISU	50	0	50	40	2	42	42	4	46	44	0	44	175	6	200
6.	RUMAH MENYUPUR SPAL	0	50	50	1	44	45	2	44	46	4	40	44	7	178	200
II TATA RUANG RUANG / RUMAH																
1.	ADA RUANG TAMU	27	23	50	32	19	45	20	26	46	26	8	44	115	70	200
2.	RUANG TOUR TERPISAH	49	1	50	40	2	42	46	0	46	44	0	44	192	3	200
3.	ADA RUANG TENGAH RUMAH	43	7	50	40	2	42	42	5	46	42	2	44	199	16	200
4.	ADA RUANG MENDAH	8	42	50	12	39	45	18	28	46	8	36	44	46	139	200
5.	ADA RUANG DAPUR	45	1	50	40	5	45	45	1	46	44	0	44	178	7	200
6.	ADA RUANG MANDI	13	39	50	16	29	45	3	43	46	11	33	44	41	144	200
KONDISI NON RUMAH																
III BUDAHN K3																
1.	PUS-BE3-40	25	8	33	20	8	28	19	6	25	22	7	29	86	29	115
2.	PUS-TOAN BE3-40 BRANDET NEED	8	25	33	8	20	28	6	29	25	7	32	29	29	86	115
3.	KELUARGA BALTH-KIT B30	7	15	22	11	13	24	0	30	20	1	8	9	29	46	65
4.	KELUARGA BEMBA-KIT B30	6	18	24	9	20	29	0	30	19	0	29	19	15	75	90
5.	KELUARGA LAMBA-KIT B30	8	19	27	8	17	25	0	32	15	0	9	9	6	37	57
6.	KELUARGA KIT-KIT-UPPS	18	40	50	5	45	46	0	46	46	0	44	44	13	175	200
7.	PESEKTA-40 PBA-KIT PAC. 10 PBA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	REMANA-KIT PBA-3	0	11	11	0	29	29	0	26	26	0	22	22	0	100	200
9.	REMANA-KIT SAKA-KENCANA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV BUDAHN KESIHATAN																
1.	KELUARGA PUNYA BALTH-KIT POKMANCO	13	9	22	11	13	24	16	13	29	8	1	9	48	36	84
2.	BATH / BALTH BOM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	LURSA DADANG KE POKMANCO	8	19	27	8	17	25	0	15	19	0	12	12	6	63	81
4.	KELUARGA MIBIN PUNYA BPA-40/WALUYA	31	19	50	29	16	45	30	16	46	30	14	44	110	61	200
V BUDAHN PENDIDIKAN																
1.	ANAK USA 7-15 TAHUN BEREKOLAH	48	2	50	43	2	45	46	0	46	44	0	44	181	4	200
2.	ANAK USA 7-15 TH TIDAK MAHU MENYUPUR	13	17	30	16	29	45	26	20	46	28	16	44	83	101	200
Jumlah Pendidikan (SD / CALAN/DESA/SEKOLAH)																
3.	ANGGOTA KELUARGA BPA-BACA TULIS	159	10	169	163	9	166	170	0	170	167	0	167	665	12	672
VI BUDAHN SOSIAL																
1.	KELUARGA MIBIN DAPAT BJT	31	19	50	33	12	45	18	28	46	12	12	44	114	71	200
2.	KELUARGA MIBIN DAPAT PDI	15	35	50	14	31	45	12	34	46	13	31	44	34	111	200
3.	KELUARGA MIBIN DAPAT WALAQR	0	50	50	0	45	45	0	46	46	2	42	44	2	183	200
4.	KELUARGA MIBIN DAPAT BANTUAN LESTARI	2	48	50	1	44	45	0	46	46	2	42	44	5	180	200
VII BUDAHN PERTANIAN																
1.	KELUARGA SUKOH MEMANFAATKAN LAHAN PERTANIHAN	11	39	50	15	30	45	0	46	46	4	40	44	30	155	200
2.	KELUARGA PETANI MENANCI HINGGOTA ELKPTAN	1	49	50	3	42	45	0	46	46	1	43	44	5	180	200
VIII STATUS KEPENDUDUKAN																
1.	ANGGOTA MEMILIKI ANTE KELAHIRAN	27	142	169	19	147	166	16	154	170	12	125	167	34	196	672
2.	ANGGOTA KELUARGA DI ANTE 17 TH PUNYA KE	104	65	169	98	68	166	112	58	170	104	63	167	418	254	672

PEMBUATAN MANISAN LABU



Kegiatan olah raga senam untuk para masyarakat lansia (Bina Keluarga Lansia)



Kegiatan Pelayanan Kesehatan untuk masyarakat Lansia di Kampung KB



Bersama Kepala Desa Tenggerraharja sebagai Penanggungjawab Kampung KB





Penyuluhan bersama PPL Pertanian

BAB V

ANGGARAN PEMBELANJAAN PENGABDIAN

Anggaran biaya terdiri dari empat komponen pembiayaan yaitu :

1. Bahan habis pakai
2. Perjalanan
3. Honorarium
4. Pelaporan

Untuk lebih merasionalkan usulan kegiatan pengabdian, biaya dibuat lebih terinci sesuai dengan keadaan harga di pasaran pada saat ini. Biaya ini disusun untuk jumlah peserta pelatihan sebanyak 20 orang.

RINCIAN PENGGUNAAN BIAYA PENGABDIAN

Dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian ini menggunakan anggaran yang dibiayai dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (LPPM) Universitas Galuh Ciamis.

Adapun perincian penggunaan anggaran adalah sebagai berikut:

No	Jenis Pengeluaran	Persentase	Biaya yang Digunakan
1	Insentif Pemateri	25 %	Rp 1.000.000,00
2	Bahan Habis Pakai dan Peralatan (ATK + Penggandaan Materi)	40 %	Rp 1.600.000,00
3	Perjalanan Ciamis – Tengerraharja (PP)	20 %	Rp 800.000,00
4	Pembuatan Laporan	15 %	Rp 600.000,00
Jumlah		100%	Rp 4.000.000,00

DAFTAR PUSTAKA

Arikunto, Suharsimi. (1993). Manajemen. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Bintarto, R. Dr.1983. Interaksi Desa-Kota.Yogyakarta: Ghalia Indonesia.

BKKBN, 2018, Kumpulan Materi dan Bahan Ajar, Bandung

Danu Wisakti, Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa Di Wilayah Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan, Magister Ilmu Administrasi Negara, UNDIP, 2008.

Fattah, Nanang.(2013). Landasan Manajemen Pendidikan.Bandung : Remaja Rosda Karya

Hernowo, Basah. 2010 Kajian Pembangunan Ekonomi Desa Untuk Mengatasi Kemiskinan.Dalam www. Bappenas.go.id.

Kartasmita,Ginandjar, 2001. Pembangunan Untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan Dan Pemerataan,Jakarta : Pustaka CIDESINDO.

Mardiasmo (2002) Otonomi Dan Manajemen Daerah.Yogyakarta.

Ndraha, Taliziduhu, 1984, Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa, Jakarta : PT. Bina Aksara.

Remi, Sutiyastie Soemitro dan Prijono Tjiptoherijanto. 2002. ***Kemiskinan dan Ketidakmerataan di Indonesia***. Jakarta: Penerbit Rineka Cipta.

Soegijoko, Budi Tjahjati S. dan BS Kusbiantoro (ed). 1997. ***Bunga Rampai Perencanaan Pembangunan di Indonesia***. Bandung : Yayasan Soegijanto Soegijoko.

Undang-Undang Republik Indonesia No 22 Tahun1999 Tentang Pemerintahan Desa

Widjaja, HAW.(2001). Pemerintahan Desa Berdasarkan UU No 22 Tahun 1999 Tentang pemerintah daerah.

Widjaja,HAW.2004. Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli Bulat dan Utuh.Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada.